

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENDUNG HIANG
KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



Oleh:

RONI PUTRA

Nim: 2110402055

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENDUNG HIANG
KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

**RONI PUTRA
Nim: 2110402055**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI PUTRA
NIM : 2110402055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENDUNG HIANG KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH. belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Sungai Penuh, Juni 2025

Yang menyatakan,




RONI PUTRA
NIM: 2110402055

iii

Materai
10.000

H. Samsul Bahri Harahap, Lc, MA

DOSEN IAIN KERINCI

| | |
|---------------|---|
| AGENDA | |
| NOMOR : | 01 |
| TANGGAL : | 9 Juni 2025 |
| PARAF : |  |

Di -

Sungai Penuh, 29 April 2025

Kepada Yth:

Bapak Dekan FEBI IAIN

Kerinci

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **RONI PUTRA, NIM: 2110402055**, yang berjudul "**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh**", dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing



H. Samsul Bahri Harahap, Lc, MA
NIP. 19691222 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp.0748-21065 Faks.0748-22114

Kode Pos.37112 Website:www.iainkerinci.ac.id

Email:info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis, Tanggal 12 Juni 2024. dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Juni 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang

**H. Samsul Bahry Harahap, Lc,MA
NIP. 19691222001121002**

Penguji I

**Elvi Nilda, SE, MM
NIP. 19750309 200003 2 002**

Penguji II

**Tiara, S.Si., M.Si
NIP. 198504152023212037**

Pembimbing

**H. Samsul Bahry Harahap, Lc,MA
NIP. 19691222001121002**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...

Sejengkal tapak kaki melangkah

dengan ikhtiar dan do'a

Kini telah ku gapai sebuah cita

Kuraih mimpi dan angan ku

Sebagai awal tuk menapaki masa depan

Syukurku pada sang khaliq

Terimakasih dan cintaku

Kepada Ayahanda Ibunda tercinta

Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka

menyelesaikan studi penulis,

Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat...

Amin...

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Surah An-Nisa ayat 29:)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PENDUNG HIANG KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH, Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi H.M. Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjut nya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Dr. Jafar Ahmad, S. Ag M. Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dan bapak Dr. Faizin, M.Pd selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag Selaku Wakil Rektor II , dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
- 2 Dekan Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Wakil Dekan Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan serta dosen-dosen Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang selama ini telah mencurahkan

seganap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

- 3 Ketua dan sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
- 4 Penasehat Akademik Ibu Suci Mahabbati, MH yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi.
- 5 Bapak H. Samsul Bahry Harahap, Lc,MA sebagai Pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.
- 7 Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan

pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Sungai Penuh, Juni 2025

Penulis



RONI PUTRA
NIM: 2110402055

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Masalah dan Fokus Masalah | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Strategi Peran Potensi Ekonomi..... | 11 |
| 2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 14 |
| 2.3 Kesejahteraan Masyarakat | 16 |
| 2.4 Penelitian yang Relevan | 25 |
| 2.5. Kerangka Konseptual | 28 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Metode dan Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| B. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian | 33 |
| C. Teknik Penentuan Informan penelitian | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| E. Instrumen Penelitian | 46 |
| F. Teknik Keabsahan Data | 52 |
| G. Teknik Analisa Data | 56 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 57 |
| B. Pembahasan | 93 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 113 |
| B. Saran | 115 |

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh Implementasi program pemberdayaan desa di Desa Pendung Hiang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. potensi ekonomi di Desa Pendung Hiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari Reduksi Data, Data Display dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Keabsahan Data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Temuan penelitian adalah Peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal. Dalam penciptaan lapangan kerja, BUMDes hanya mampu menyerap 7 tenaga kerja dari 350 kepala keluarga di desa, dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 30%. Unit simpan pinjam telah memfasilitasi akses permodalan bagi 25 keluarga, namun dampaknya masih terbatas. Untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes telah mengidentifikasi komoditas unggulan berupa kopi dan tenun songket, serta peluang agrowisata, namun masih dalam tahap perencanaan dengan kendala modal dan kapasitas SDM. Dari segi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, BUMDes menyetorkan Rp12 juta atau hanya sekitar 1% dari total anggaran desa, dengan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi 8 siswa yang cakupannya masih sangat terbatasketerampilan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Peran,

K E R I N C I

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of the village empowerment program in Pendung Hiang Village, which has not been optimal in improving the welfare of the community. The low capacity of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in managing local economic potential is one of the contributing factors. The purpose of this study is to reveal the management of BUMDes in improving the welfare of the Pendung Hiang Village community in Tanah Kampung Subdistrict, Sungai Penuh City. The research focuses on the economic potential in Pendung Hiang Village to enhance the welfare of its residents.

This study uses a qualitative research method. The informants in this study were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis consisted of data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The data validity technique employed source triangulation and method triangulation to test the validity of the data related to the research problem.

The findings of the study indicate that the role of BUMDes in Pendung Hiang Village in improving the welfare of the community has not yet achieved optimal results. In terms of job creation, BUMDes has only been able to absorb 7 workers out of 350 households in the village, with a poverty rate still reaching 30%. The savings and loan unit has facilitated capital access for 25 families, but the impact has been limited. In the development of businesses based on local potential, BUMDes has identified superior commodities such as coffee and songket weaving, as well as agrotourism opportunities, but they are still in the planning stage with constraints in capital and human resource capacity. In terms of contributing to the village's Local Revenue, BUMDes has contributed IDR 12 million, or only about 1% of the total village budget, with social assistance programs such as scholarships for 8 students, which still have a very limited scope in terms of skills development and creating new business opportunities for the village community.

Keywords: BUMDes, Community Welfare, Role,



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi berbasis desa merupakan suatu strategi fundamental yang telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Utami & Santoso, 2022). Desa, dengan segala potensi sumber daya alam dan modal sosial yang dimilikinya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Potensi ini, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi pilar penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Menurut Yunus (2020), desa memiliki kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dengan mengoptimalkan potensi alam dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, peran ekonomi berbasis desa sangat penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kemandirian ekonomi desa tidak hanya membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun perekonomian nasional yang lebih merata.

Pentingnya peran potensi ekonomi desa juga tidak terlepas dari ajaran dalam perspektif ekonomi syariah yang memberikan prinsip dasar keadilan sosial dan keberlanjutan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menggambarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dalam peran potensi ekonomi desa adalah Surah Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka apabila telah ditunaikan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja dan berusaha untuk mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah. Dalam konteks peran ekonomi desa, ayat ini mendorong masyarakat untuk aktif bekerja, mengelola potensi ekonomi yang ada, dan mengingat Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Kemudian dalam Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta pentingnya kerelaan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks peran ekonomi desa, ayat ini menjadi pedoman untuk menjalankan usaha bersama dengan prinsip yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Kedua ayat tersebut memberikan dasar yang kuat bagi peran ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan kerja keras.

Dalam konteks BUMDes, peran ekonomi melalui usaha bersama yang dikelola dengan prinsip syariah akan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda

bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi desa dengan BUMDes yang berbasis pada prinsip syariah akan mengutamakan kemaslahatan bersama, keadilan distribusi keuntungan, dan keberlanjutan usaha yang sesuai dengan hukum Islam (Izzuddin, 2020). Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan ekonomi yang dijalankan melalui BUMDes tidak hanya bertujuan untuk profit, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperbaiki kesejahteraan secara merata.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa, diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama. Perspektif ekonomi syariah mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis, harus ada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat, serta menghindari praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba dan ketidakadilan (Taufik & Anwar, 2023).

Seiring dengan berkembangnya kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat perekonomian Melalui program-program seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan BUMDes sebagai instrumen untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi desa, dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan ini didukung oleh dana desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa (Sudarno, 2021). Hal ini

sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Studi komparatif oleh Pratama & Susilo (2021) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan mengidentifikasi beragam model peran BUMDes di Indonesia. Penelitian mengungkap variasi strategi pemberdayaan ekonomi desa, namun masih terdapat kesenjangan dalam pendekatan berbasis syariah. Penelitian Hidayatullah et al. (2022) dalam Jurnal Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa masih terbatas penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran BUMDes dalam perspektif ekonomi syariah. Kesenjangan penelitian ini menjadi ruang bagi kontribusi akademik dalam mengeksplorasi model pemberdayaan ekonomi desa yang holistik. Penelitian Wiranta et al. (2022) dalam Jurnal Pembangunan Wilayah mengungkapkan masih terbatasnya kapasitas kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Kesimpulan studi menunjukkan rendahnya akses masyarakat desa terhadap sumber permodalan dan jaringan usaha menjadi hambatan utama peran ekonomi lokal.

Desa Pendung Hiang terletak di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang unik. Secara topografis, desa ini didominasi area pertanian dengan kondisi lahan yang relatif subur. Di Desa Pendung Hiang terletak di Kecamatan Tanah Kampung juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menggerakkan perekonomian desa. Rendahnya kapasitas pengelolaan dan tata kelola kelembagaan BUMDes menjadi permasalahan mendasar. Minimnya inovasi dan diversifikasi usaha dalam

lingkup BUMDes menghambat potensi peran ekonomi lokal. Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat signifikan di Indonesia. Potensi ekonomi desa belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sementara keberadaan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal masih memerlukan penguatan kapasitas dan pendekatan yang komprehensif. Mayoritas penduduk Desa Pendung Hiang bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat pendapatan rendah. Terbatasnya akses modal dan infrastruktur ekonomi di wilayah pedesaan menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 30 November 2024 dan wawancara dengan kepala desa serta tokoh masyarakat menunjukkan bahwa Aspek kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperbaiki, dimana struktur organisasi BUMDes belum terkelola dengan baik dan profesional. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi kendala utama. Di sisi lain, aspek ekonomi juga menjadi masalah utama, seperti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta keterbatasan modal usaha dan akses pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, diperoleh gambaran komprehensif permasalahan BUMDes. Wawancara dengan Kepala Desa Pendung Hiang, mengungkapkan: "Kami mengalami kesulitan dalam mengembangkan BUMDes karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman tentang pengelolaan usaha desa." Wawancara dengan tokoh masyarakat,

mengungkapkan: "Masyarakat masih belum memahami secara mendalam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui BUMDes."

Meskipun potensi ekonomi desa cukup besar, banyak desa, termasuk Desa Pendung Hiang di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Desa Pendung Hiang di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui BUMDes. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta perangkat desa, beberapa sektor unggulan di desa ini meliputi: Pertanian dan Perkebunan Desa Pendung Hiang memiliki lahan pertanian yang subur dengan komoditas utama seperti padi, sayuran, dan tanaman hortikultura lainnya.

Selain itu, perkebunan kopi dan kayu manis menjadi sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian desa. Namun, masalah pemasaran dan kurangnya akses ke pasar yang lebih luas masih menjadi kendala utama bagi petani. Peternakan: Potensi peternakan di desa ini cukup besar, terutama dalam bidang budidaya sapi, kambing, dan unggas. Namun, belum ada sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik, sehingga hasil produksi belum optimal dalam memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes di Desa Pendung Hiang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan potensi desa yang ada. Dalam hal ini, penting untuk melihat kesenjangan antara potensi yang ada dan

pengelolaannya, serta bagaimana BUMDes dapat berfungsi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Perspektif ekonomi syariah sangat relevan dalam konteks peran ekonomi desa. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada potensi lokal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana model peran ekonomi desa yang berbasis syariah dapat diterapkan di Desa Pendung Hiang. Transformasi ekonomi desa yang berbasis syariah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi peran BUMDes di Desa Pendung Hiang, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang telah diuraikan di atas, serta hasil wawancara dan penelitian terdahulu yang memperkuat masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh”**.

1.2 Masalah dan Fokus Masalah

Masalah dalam penelitian peneliti mengidentifikasi dari masalah sebagai berikut:

1. Implementasi program pemberdayaan desa di Desa Pendung Hiang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Rendahnya kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi lokal
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam peran unit usaha desa
4. Minimnya inovasi dan diversifikasi usaha ekonomi berbasis potensi lokal
5. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa
6. Terbatasnya akses modal dan pembiayaan
7. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam peran BUMDes

Penelitian ini membatasi kajian pada peran potensi ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan BUMDes yang meliputi aspek kelembagaan, ekonomi, dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Subjek penelitian adalah pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Pendung Hiang sebagai informan utama, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengelolaan BUMDes dan mencari solusi berbasis ekonomi syariah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana potensi ekonomi di Desa Pendung Hiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
2. Mengidentifikasi potensi ekonomi di Desa Pendung Hiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

3. Menyusun rekomendasi untuk peran BUMDes dalam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademik dalam peran teori ekonomi desa
 - b. Memperkaya kajian tentang pemberdayaan ekonomi berbasis syariah
 - c. Mengembangkan model konseptual peran BUMDes
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola BUMDes, pemerintah desa, serta masyarakat desa Pendung Hiang dalam meningkatkan kinerja BUMDes, penerapan prinsip ekonomi syariah, dan memaksimalkan potensi ekonomi desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan panduan bagi kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan, berbasis pada nilai-nilai syariah yang adil dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi Peran Potensi Ekonomi

1. Pengertian Peran Potensi Ekonomi

Peran potensi ekonomi merupakan upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Widodo (2021), peran potensi ekonomi adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan modal yang ada untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi di suatu wilayah, termasuk sektor produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional, tetapi juga dapat mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih produktif dan berdaya saing.

Konsep peran ekonomi di desa juga mencakup pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui pembukaan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, serta pemahaman tentang teknologi dan pasar. Peran potensi ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih layak. Penerapan peran ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dapat menjadi jalan keluar bagi banyak desa

yang selama ini bergantung pada sektor agraris semata. Dalam hal ini, fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan (Nugroho, 2022).

Selain itu, dalam perspektif ekonomi pembangunan, peran potensi ekonomi juga melibatkan upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga ekonomi yang ada di masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Melalui BUMDES, masyarakat desa dapat mengelola potensi yang ada dengan cara yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, sehingga menciptakan peluang baru untuk penghasilan dan penciptaan lapangan kerja. Penerapan prinsip ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan dan pemerataan, baik dalam aspek distribusi maupun konsumsi, akan membawa perubahan yang signifikan dalam ekonomi desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyadi (2023), peran potensi ekonomi desa bukan hanya soal memperkenalkan usaha baru, tetapi juga bagaimana membangun fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran potensi ekonomi adalah suatu proses yang penting dan strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Peran ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi. Dalam konteks desa, BUMDES memiliki peran kunci dalam memfasilitasi peran potensi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan

masyarakat desa. Peran potensi ekonomi yang berbasis pada prinsip ekonomi syariah juga sangat relevan, karena dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan kesejahteraan sosial, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Bagian-Bagian Peran Potensi Ekonomi

Peran potensi ekonomi melibatkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain: pertama, identifikasi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Hal ini meliputi potensi alam, manusia, dan modal yang dapat dimanfaatkan untuk peran ekonomi. Kedua, analisis kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Ketiga, penguatan lembaga-lembaga ekonomi lokal, seperti BUMDES, yang dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut. Keempat, penerapan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang ada di desa. Terakhir, evaluasi dan pemantauan keberhasilan peran ekonomi yang dilakukan, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Peran potensi ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal ini sangat penting untuk menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya desa dengan pendekatan yang tepat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran potensi ekonomi tidak hanya melibatkan pemanfaatan sumber

daya alam semata, tetapi juga pembangunan kapasitas manusia dan penguatan kelembagaan yang ada.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang terdiri dari beberapa dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar. Desa juga berfungsi sebagai basis dari ekonomi pedesaan yang menyumbangkan sektor pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Sebagai subjek dalam pembangunan, desa juga memerlukan pemanfaatan optimal terhadap potensi-potensi tersebut agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan potensi lokalnya, baik itu melalui potensi sumber daya alam maupun pengelolaan sumber daya manusia untuk tujuan pembangunan yang lebih merata (Saputra, 2021).

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga yang didirikan oleh desa untuk mengelola potensi ekonomi desa. Fungsi utama BUMDES adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di desa dengan memberikan lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas ekonomi, serta meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dalam hal ini, BUMDES berperan sebagai pengelola sumber daya ekonomi desa, mulai dari pengelolaan usaha pertanian,

perdagangan, industri kecil, hingga sektor pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa, BUMDES memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki struktur perekonomian desa. Menurut Asyari (2020), BUMDES merupakan sarana pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha yang dijalankan.

3. Dasar Hukum dan Fungsi BUMDES

Secara hukum, pendirian dan pengelolaan BUMDES diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. UU Desa ini memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Dalam UU Desa, BUMDES juga diharapkan dapat berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi Melalui berbagai kegiatan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Fungsi BUMDES tidak hanya sebatas sebagai badan yang menjalankan usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara desa dengan pasar, serta sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa. Dalam konteks ini, BUMDES menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan keberlanjutan dan pemerataan hasil usaha (Arifianto, 2022).

Peran Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDES diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan ekonomi desa, dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat lokal. BUMDES memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), membuka lapangan pekerjaan, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal. Melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, BUMDES tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa di masa depan.

Dasar hukum terkait BUMDES sudah jelas diatur dalam UU Desa dan peraturan turunannya, yang memberikan peluang bagi desa untuk mengelola dan memanfaatkan potensi lokal secara lebih mandiri dan produktif. Fungsi BUMDES yang meliputi pengelolaan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa, menjadikannya sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi desa.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dasar individu dan kelompok dalam masyarakat terpenuhi secara memadai, baik dari segi material, sosial, maupun psikologis. Menurut Suharto (2021), kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang dicirikan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar

manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, pendapatan yang layak, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Kesejahteraan masyarakat juga mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana seluruh warga negara dapat hidup layak, bebas dari kemiskinan, dan menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia. Kesejahteraan ini tidak hanya mengacu pada dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial.

2. Dimensi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang saling terkait. Menurut Bappenas (2020), dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a. Kesejahteraan Ekonomi: Ini mencakup pendapatan yang layak, pekerjaan yang stabil, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai.
- b. Kesejahteraan Sosial: Ini mencakup pendidikan yang berkualitas, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan sosial berfokus pada upaya memastikan setiap individu memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. Kesejahteraan Lingkungan: Kondisi lingkungan yang baik, seperti udara bersih, air yang aman untuk dikonsumsi, dan lingkungan hidup yang sehat, juga merupakan aspek penting dari kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sen (2020), kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-material, seperti kebebasan individu dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kesejahteraan yang holistik harus mempertimbangkan kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

3. Faktor Penentu Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Prasetyo (2019), beberapa faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a. Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang ekonomi dan sosial, serta membantu individu mencapai potensi penuh mereka.
- b. Kesehatan: Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja dan berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup.
- c. Infrastruktur dan Aksesibilitas: Akses terhadap infrastruktur dasar seperti transportasi, sanitasi, dan air bersih sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai membantu meningkatkan kualitas hidup dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.
- d. Keadilan Sosial: Keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi juga mempengaruhi kesejahteraan. Menurut Suparlan (2021), ketidakadilan sosial dapat menjadi penghalang bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat karena menciptakan ketimpangan yang menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya penting.

Berdasarkan landasan teori di atas, kesejahteraan masyarakat adalah konsep multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap dimensi ini saling berinteraksi untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2021), kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi material, tetapi juga dari segi sosial, yang mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan akses yang merata terhadap sumber daya yang tersedia.

2.4 Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui pengelolaan dan distribusi sumber daya yang adil. Ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, baik itu jual beli, investasi, maupun transaksi keuangan, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam (Syariah). Salah satu ciri khas dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip tersebut diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang mengedepankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, tanpa ada pihak yang dirugikan. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan materi dan keberkahan spiritual (Mulyadi, 2019).

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam ekonomi syariah, praktik riba tidak dibenarkan. Islam mengharamkan riba karena ia menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang adil haruslah bebas dari praktik riba dan mengutamakan kejujuran dalam transaksi. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan dan stabilitas ekonomi yang tidak merugikan salah satu pihak, baik itu produsen atau konsumen.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip pertama adalah keadilan, yang mengharuskan setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Prinsip kedua adalah kepemilikan yang sah,

yaitu setiap individu atau entitas hanya dapat memiliki barang atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum Islam. Prinsip ketiga adalah larangan riba, yang melarang setiap transaksi yang berhubungan dengan bunga atau pinjaman yang membebani salah satu pihak. Selanjutnya, prinsip keempat adalah larangan terhadap spekulasi (*maysir*), yang menghindari ketidakpastian dan risiko yang berlebihan dalam transaksi, dan prinsip kelima adalah transparansi, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat (Teguh, 2020). Prinsip-prinsip ini membantu membangun ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keseimbangan material dan spiritual, serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Melalui sistem ekonomi syariah, diharapkan dapat tercipta pemerataan kekayaan, penghapusan ketidakadilan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan kaidah syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih humanis dan etis dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali mementingkan keuntungan materi semata.

Adapun tujuan dari penerapan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam syariah, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan

transparan. Penerapan ekonomi syariah yang tepat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi kekayaan yang lebih merata, yang pada akhirnya membawa pada kesejahteraan umat secara keseluruhan.

2.5 Peran Potensi Ekonomi Melalui BUMDES dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Peran potensi ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perspektif ekonomi syariah, peran ini sangat relevan karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah sendiri menekankan pada distribusi kekayaan yang merata, penghindaran praktik riba, serta pengelolaan sumber daya secara etis dan adil. Dalam hal ini, BUMDES berperan sebagai alat untuk memobilisasi dan mengelola potensi ekonomi yang ada di desa, baik itu dalam bentuk sumber daya alam, produk lokal, maupun jasa yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Salim (2020), BUMDES dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa yang efektif apabila dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa BUMDES yang menerapkan sistem syariah cenderung lebih mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharamkan praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang biasa ditemukan dalam sistem

ekonomi konvensional. Dengan demikian, pengelolaan BUMDES berdasarkan prinsip ekonomi syariah dapat menghasilkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa tanpa merugikan pihak manapun. Lebih lanjut, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam BUMDES membantu menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMDES, karena dapat memberikan pedoman bagi pengelolaan dana dan aset desa yang lebih adil dan transparan. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, yaitu setiap transaksi yang mengandung unsur bunga atau keuntungan yang tidak sah. Prinsip ini mendorong pengelolaan BUMDES yang mengutamakan skema pembiayaan yang adil dan tidak memberatkan masyarakat. Misalnya, dalam skema pembiayaan usaha melalui mudharabah atau musyarakah, dua jenis kontrak syariah yang mengedepankan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Rina (2021) dalam penelitiannya mengenai implementasi ekonomi syariah di BUMDES menemukan bahwa penerapan prinsip mudharabah dalam BUMDES memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha desa dengan modal yang lebih kecil, tanpa dikenakan bunga atau beban yang merugikan. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga mengharuskan pengelolaan dana desa dilakukan dengan

transparansi penuh dan memprioritaskan keberlanjutan usaha yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan seluruh masyarakat desa. Konsep keadilan distributif ini menjadi dasar bagi BUMDES untuk mengalokasikan hasil keuntungan usaha kepada seluruh anggota desa sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi mereka.

Kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan memberikan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. BUMDES, sebagai lembaga ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa, memiliki peran sentral dalam peran ekonomi lokal. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam BUMDES dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dalam hal pembagian hasil ekonomi.

Suprpto dan Prabowo (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BUMDES yang menerapkan ekonomi syariah mampu meningkatkan daya saing produk desa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa BUMDES yang menggunakan pendekatan syariah memiliki dampak sosial yang lebih positif, karena pengelolaan usaha dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip saling menguntungkan, serta hasil usaha dibagi secara merata di antara anggota desa.

Sebagai contoh, salah satu BUMDES yang menerapkan prinsip syariah adalah BUMDES Desa Sukamulya yang mengembangkan usaha produk olahan

pertanian. Melalui model pembiayaan syariah, mereka berhasil mengelola dana desa dengan cara yang efisien dan adil, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam BUMDES dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata dan berkelanjutan (Sari, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran potensi ekonomi Melalui BUMDES dalam perspektif ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil yang adil, dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengelolaan BUMDES dengan prinsip syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang besar bagi masyarakat desa, dengan meningkatkan partisipasi ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, BUMDES yang dikelola secara syariah menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka Bagian ini merupakan pemaparan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa kajian literatur hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1 Peneliti relevan

| No | Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Siti Maryam, Nurul Huda, Ahmad Zubaidi (2022) | Peran Potensi Ekonomi Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati | BUMDes berperan signifikan dalam pengembangan ekonomi melalui unit usaha simpan pinjam, perdagangan umum, dan pemberdayaan ekonomi produktif | Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan ekonomi syariah dalam peran BUMDes |
| 2 | Muhammad Iqbal, Rini Suharti, Endang Purwanti (2021) | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan BUMDes di Kabupaten Bogor | Kapasitas kelembagaan dan inovasi usaha menjadi kunci keberhasilan ekonomi desa; merekomendasikan pendampingan dan pelatihan bagi pengelola BUMDes | Penelitian saat ini lebih fokus pada integrasi nilai ekonomi syariah dan peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat |
| 3 | Rahmat Hidayat, Sri Wahyuni, Bambang Supriyono (2022) | Implementasi Peran Ekonomi Melalui BUMDes di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang | Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah | Penelitian ini lebih menekankan aspek kelembagaan, ekonomi, dan spiritual berbasis ekonomi syariah |
| 4 | Eko Widodo, Agus Salim (2020) | Pengelolaan BUMDes Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Desa di Kabupaten Pematang | Pengelolaan BUMDes berhasil meningkatkan ekonomi melalui sektor pertanian dan kerajinan tangan | Fokus penelitian ini adalah pada implementasi ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes |
| 5 | Bambang Setiawan, Dewi Hartati (2019) | Analisis Kinerja BUMDes dalam Mengembangkan Potensi Desa | BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperkuat | Penelitian ini lebih mengarah pada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | sistem ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM | pengelolaan BUMDes |
| 6 | Indah Dwi Lestari, Fendi Anwar (2020) | Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa | BUMDes di beberapa daerah telah meningkatkan perekonomian dengan sistem usaha simpan pinjam dan koperasi | Penelitian ini menekankan pada penerapan ekonomi syariah dan pendekatannya dalam mengelola BUMDes |
| 7 | Faisal Akbar, Tuti Suryani (2018) | Pengaruh Pengelolaan BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa | BUMDes memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor produktif | Penelitian ini berfokus pada integrasi ekonomi syariah dalam pemberdayaan melalui BUMDes |
| 8 | Nabila Fitriani, Muhammad Salim (2021) | Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui BUMDes di Kabupaten Bandung | Pengelolaan usaha mikro melalui BUMDes berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan | Penelitian ini menambah perspektif dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam usaha BUMDes |
| 9 | Sukmawati, Eko Priyanto (2019) | BUMDes sebagai Katalisator Pembangunan Ekonomi Desa di Bali | BUMDes memfasilitasi pembangunan ekonomi desa melalui sektor pertanian dan pariwisata | Penelitian ini memperluas pembahasan pada penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam sektor usaha desa |
| 10 | Taufik Hidayat, Siti Aisyah (2021) | Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Kapasitas kelembagaan yang kuat mendorong keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan ekonomi lokal | Penelitian ini lebih menekankan pada peran prinsip ekonomi syariah dalam keberhasilan BUMDes di masyarakat desa |

2.7 Kerangka Konseptual

Peran potensi ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan BUMDES dapat memberikan manfaat sosial yang luas, karena mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta penghindaran dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

BUMDES merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di desa, seperti sumber daya alam, budaya, dan tenaga kerja lokal. Badan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut Syamsuddin (2022), BUMDES dapat menjadi alternatif solusi untuk pemberdayaan ekonomi di pedesaan yang bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, BUMDES bukan hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial dan keadilan bagi masyarakat desa. Ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan distribusi kekayaan, kesejahteraan bersama, dan penghindaran dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (perjudian). Oleh karena itu, pengelolaan BUMDES harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

desa. Menurut Rahmat (2023), ekonomi syariah dalam konteks BUMDES harus memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan usaha, serta penghindaran praktik yang merugikan masyarakat, seperti pinjaman berbunga tinggi.

Selain itu, peran BUMDES di Desa Pendung Hiang dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti produk pertanian, kerajinan tangan, atau wisata desa. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, BUMDES dapat menciptakan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan usaha yang berbasis pada nilai-nilai syariah ini akan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat (2020), yang menyatakan bahwa BUMDES yang dikelola secara baik dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam implementasinya, BUMDES yang berbasis ekonomi syariah dapat mengembangkan usaha-usaha yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengelola produk-produk halal dan ramah lingkungan. Pemanfaatan sistem keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDES juga penting untuk memastikan bahwa praktik keuangan yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari transaksi yang melibatkan riba dan spekulasi.

Secara keseluruhan, peran potensi ekonomi Melalui BUMDES dengan pendekatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pemanfaatan potensi lokal, pengelolaan yang adil dan berkelanjutan, serta prinsip-prinsip syariah, BUMDES dapat menjadi

motor penggerak ekonomi desa yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas maka dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Saifuddin, 2021). Menurut (Sugiyono, 2016) Pendekatan kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitian ini diadakan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (data dibalik yang teramati) *ditetapkan* (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan menggambarkan secara mendalam bagaimana peran potensi ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi di masyarakat desa, khususnya terkait dengan pengelolaan BUMDES yang dilakukakan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman terhadap

konteks sosial dan makna subjektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif berfokus pada pendokumentasian dan penggambaran fenomena yang terjadi dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pendung Hiang, tanpa berusaha untuk membuat generalisasi atau membandingkan dengan populasi yang lebih besar. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan kondisi nyata tentang bagaimana BUMDES beroperasi dan bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam aktivitas ekonomi desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan lebih kepada penggambaran proses dan praktik yang terjadi dalam konteks sosial yang spesifik.

Penelitian kualitatif dalam konteks ini digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Jenis penelitian ini memberi ruang untuk pengumpulan data yang bersifat naratif, terbuka, dan berfokus pada pengalaman subjektif masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMDES. Peneliti ingin memahami bagaimana masyarakat desa merasakan dan memaknai keberadaan BUMDES, serta bagaimana mereka melihat prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi desa.

Pendekatan deskriptif, dalam hal ini, memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa memberikan penilaian atau

generalisasi yang berlebihan. Peneliti hanya mendokumentasikan apa yang terjadi, bagaimana proses-proses tersebut berlangsung, dan apa dampaknya terhadap masyarakat desa. Deskripsi ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang pengelolaan BUMDES dan penerapan ekonomi syariah, serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini juga berupaya untuk mengungkap bagaimana masyarakat desa mengalami dan memahami fenomena ini, berdasarkan perspektif mereka sendiri, bukan dari pandangan luar atau teoretis yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks lokal.

3.2 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran potensi ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah. Ruang lingkup penelitian mencakup berbagai aspek terkait peran BUMDES dalam mendorong peningkatan ekonomi desa, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan BUMDES untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan dan Potensi BUMDES: Penelitian akan menganalisis bagaimana BUMDES dikelola dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa Pendung Hiang untuk dikembangkan melalui BUMDES. Fokus utama akan pada jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDES, serta strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
2. Peran BUMDES dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Penelitian ini akan menggali bagaimana keberadaan BUMDES berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Aspek ini akan dieksplorasi dengan menganalisis dampak langsung BUMDES terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan, dan peran usaha mikro atau usaha kecil masyarakat.
3. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan BUMDES: Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDES di desa Pendung Hiang. Dalam perspektif ini, penelitian akan melihat apakah prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan diterapkan dalam praktik pengelolaan BUMDES, serta bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat memperkuat keberlanjutan usaha dan mendukung kesejahteraan sosial di desa.
4. Strategi Peran Ekonomi Desa: Penelitian ini juga akan membahas strategi yang diterapkan oleh pihak desa dan pengelola BUMDES dalam

mengembangkan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk memperkenalkan produk-produk lokal, peran sektor-sektor usaha yang ada, dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi desa di pasar yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pendung Hiang, yang terletak di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang aktif dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Pendung Hiang merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan potensi alam lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha berbasis masyarakat. Keberadaan BUMDES di desa ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana model ekonomi berbasis syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha desa dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lokasi penelitian di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, memiliki akses yang cukup baik ke pusat-pusat perekonomian di sekitar wilayah tersebut, namun masih menghadapi tantangan dalam peran ekonomi lokal yang lebih mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana BUMDES dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan sekitarnya.

3.3 Teknik Penentuan Informan penelitian

Menurut (Moleong, 2019) informan penelitian adalah informan yang bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil objek yang dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan data dan informasi valid sebagai bahan informasi dan data penelitian. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas.

Menurut (Saifuddin, 2021) Informan atau subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang darinya diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan. Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan prosedur *purposif*, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Pemilihan subjek penelitian atau informan di dasarkan pada kemampuan informan menyediakan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya, Peneliti menyakini penelitian dan apa yang diamati maka hal ini menjadi aspek validitas penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Selain itu informan juga dapat memenuhi aspek reliabilitas penelitian dimana mereka mengikuti bias penting yang mempengaruhi jenis penjelasan yang didapatkan pada mereka.

Menurut (Sugiyono, 2018) untuk memilih informan sebaiknya memenuhi kreteria sebagai berikut :

1. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasanya” sendiri (Mahmud, 2017).

Informan dalam penelitian ini dapat dilihat Jumlah pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

| Nomor | Informan | Jumlah Informan |
|-------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Kepala Desa Pendung Hiang | 1 |
| 2 | Tokoh Masyarakat Desa | 1 |
| 3 | Pengelola BUMDES | 1 |
| 4 | Anggota BUMDES | 1 |
| 5 | Masyarakat Pengguna BUMDES | 2 |
| 6 | Tokoh Agama | 1 |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sujarweni, 2015) teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik dan cara ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang didapat dari lapangan sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis.

Dalam penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, penggunaan berbagai teknik

pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing teknik ini memiliki peran dan kontribusi unik dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2009).

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDES. Peneliti dapat mengamati bagaimana program-program BUMDES diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengamatan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas ekonomi yang diinisiasi oleh BUMDES, keberlanjutan usaha, serta tingkat partisipasi

dan penerimaan masyarakat terhadap program-program yang ada. Selain itu, observasi juga dapat membantu peneliti untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengelolaan BUMDES, seperti menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta bagaimana hasil usaha BUMDES dibagikan untuk kepentingan masyarakat desa.

b. Wawancara / (*Interview*)

Menurut Sugiono (2009) wawancara adalah Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara semi terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu (Idrus, 2009).

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan perspektif langsung dari individu-individu yang memiliki peran penting dalam peran dan pengelolaan BUMDES. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh data tentang strategi yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDES, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menggali penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari BUMDES. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara akan berkisar pada topik-topik seperti pengelolaan keuangan BUMDES, pengaruh BUMDES

terhadap tingkat pendapatan masyarakat, serta penerapan hukum syariah dalam keputusan ekonomi yang diambil oleh BUMDES.

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi-struktural, yang berarti peneliti telah menyiapkan panduan wawancara namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk mengungkapkan pemikiran mereka lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam yang mungkin tidak dapat dijawab dengan pertanyaan yang terlalu terstruktur. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya tentang bagaimana BUMDES dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam konteks tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut (Riduwan, 2016) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, intruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitanya dengan fokus penelitian (Moleong, 2006:159)..

Dokumentasi dalam penelitian ini akan digunakan untuk memperoleh data objektif yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi ekonomi desa, pengelolaan BUMDES, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Laporan keuangan BUMDES, misalnya, dapat memberikan informasi mengenai arus kas dan keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Selain itu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan desa, seperti peraturan desa yang mendukung pengelolaan BUMDES, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah desa mengatur dan mendukung keberlanjutan usaha BUMDES.

Dokumentasi juga dapat memberikan bukti konkret mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDES. Misalnya, laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana yang diperoleh dari usaha BUMDES dan bagaimana pembagian hasil usaha dilakukan dengan adil, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dokumen ini akan menjadi bukti pendukung yang kuat untuk mengonfirmasi temuan-temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam studi "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh", instrumen

penelitian yang akan digunakan meliputi lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Masing-masing instrumen ini dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Lembar Wawancara:

Lembar wawancara adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas selama wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, lembar wawancara akan dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pemberdayaan desa di Desa Pendung Hiang.

Lembar wawancara berfungsi untuk menggali informasi lebih mendalam dari para informan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan BUMDES dan penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi desa. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data yang lebih spesifik mengenai:

- a. Tujuan dan Strategi BUMDES: Peneliti dapat menggali tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDES dan strategi yang digunakan untuk mencapainya. Hal ini mencakup bagaimana pengelola BUMDES merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah: Wawancara akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan langsung dari pengelola BUMDES mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah

diterapkan dalam aktivitas ekonomi BUMDES. Misalnya, apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

- c. Dampak BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Melalui wawancara, peneliti dapat mendalami bagaimana BUMDES memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa, apakah ada perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, atau kesejahteraan masyarakat setelah adanya BUMDES.
- d. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi: Wawancara juga dapat menggali kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola BUMDES dalam menjalankan usaha dan bagaimana mereka menghadapinya, baik dari segi manajerial, keuangan, maupun dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat semi-struktural, artinya peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi juga memberikan kebebasan bagi informan untuk mengungkapkan pemikiran mereka lebih luas. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan lebih terperinci.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut (Arikunko, 2017) dalam menguji keabsahan

data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menurut (Idrus, 2014) triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber data (misalnya, wawancara dengan pengelola BUMDES, masyarakat, dan pihak terkait lainnya), serta berbagai metode pengumpulan data (seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Triangulasi bertujuan untuk mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu sumber data atau satu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan objektif tentang bagaimana pengelolaan BUMDES berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam perspektif ekonomi syariah. Misalnya, jika hasil wawancara dengan pengelola BUMDES menunjukkan dampak positif dari kegiatan BUMDES terhadap ekonomi desa, peneliti akan mencari data pendukung dari hasil

observasi langsung di lapangan, atau mungkin dengan mengonfirmasi temuan tersebut melalui wawancara dengan anggota masyarakat desa.

Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memperoleh bukti yang lebih kuat mengenai fenomena yang sedang diteliti. Jika data dari sumber yang berbeda atau metode yang berbeda saling mendukung, maka keabsahan data dapat lebih dipercaya. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dapat membuka peluang untuk menggali lebih dalam dan mengeksplorasi sebab-sebab perbedaan tersebut.

2. Perpanjangan Pengamatan

Menurut (Idrus, 2014) perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan BUMDES dalam periode waktu tertentu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bukan hanya mencerminkan kondisi sesaat, tetapi juga menunjukkan dinamika dan perubahan yang terjadi selama waktu tertentu.

Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi di BUMDES dan dampaknya terhadap masyarakat desa. Dalam konteks BUMDES, keberlanjutan dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak dapat dilihat hanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk mengamati kegiatan BUMDES dalam periode yang lebih lama, misalnya selama beberapa bulan atau tahun, untuk mengetahui apakah dampaknya bersifat jangka panjang atau hanya sesaat.

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti juga dapat menangkap perkembangan usaha BUMDES dan melihat bagaimana perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pengamatan dalam jangka waktu yang lebih lama memungkinkan peneliti untuk menangkap faktor-faktor yang mungkin tidak tampak dalam pengamatan jangka pendek, seperti perubahan dalam pola konsumsi atau pendapatan masyarakat akibat pengelolaan BUMDES yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis (Sugiyono, 2018). Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek

pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum (Idrus, 2019).

Dalam penelitian ini, meningkatkan kecermatan berarti memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan adalah valid, relevan, dan akurat, serta disusun dengan cara yang sistematis dan terperinci. Peningkatan kecermatan dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa peneliti memperhatikan dengan seksama setiap aspek dari pengumpulan data hingga analisis. Peneliti akan lebih teliti dalam mendesain instrumen penelitian, seperti lembar observasi dan wawancara, untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menggali informasi yang mendalam. Selama pengumpulan data, peneliti juga harus cermat dalam mencatat informasi, baik secara tertulis maupun melalui perekaman, agar data yang diperoleh tetap akurat dan tidak hilang.

Selain itu, peneliti juga akan meningkatkan kecermatan dalam menganalisis data dengan hati-hati, menghindari asumsi atau generalisasi yang tidak berdasar, dan selalu merujuk pada data yang konkret dan relevan. Ketelitian dalam menganalisis data akan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode analisis data yang akan digunakan juga mempengaruhi teknik pengumpulan data serta pengukuran variabel yang diteliti di lapangan (Andriani, 2011).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan dengan judul penelitian. Tahapan analisis yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Moleong, 2019)

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan peran potensi ekonomi Melalui BUMDES serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di Desa Pendung Hiang. Proses reduksi data pada penelitian ini melibatkan beberapa langkah, seperti:

- a. **Pemilahan Data:** Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, perlu dipilah berdasarkan topik-topik utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Misalnya, data yang berkaitan dengan strategi pengelolaan BUMDES, penerapan ekonomi syariah dalam usaha yang dijalankan oleh BUMDES, serta dampak BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat desa, akan disaring untuk dipertahankan.
- b. **Pengorganisasian Data:** Setelah data dipilih, tahap selanjutnya adalah mengorganisasi data tersebut dalam bentuk kategori atau tema-tema tertentu. Misalnya, tema-tema yang terkait dengan pengelolaan BUMDES, penerapan prinsip syariah, serta keberlanjutan usaha BUMDES.
- c. **Penyederhanaan Data:** Selanjutnya, data yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan disingkirkan. Ini penting untuk menjaga fokus analisis pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana BUMDES mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.
- d. **Reduksi data** berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengolah informasi yang banyak dan kompleks. Dengan mengurangi data yang tidak relevan, peneliti dapat lebih fokus pada informasi yang memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan penelitian, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih tajam dan mendalam.

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya (Margono, 2017)

Dalam penelitian ini, display data akan berupa penyusunan data dalam bentuk naratif yang menggambarkan situasi atau fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai faktor yang berperan dalam pengelolaan BUMDES dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahap display data, peneliti akan menyusun data yang relevan dengan menggunakan tema-tema yang telah diidentifikasi pada tahap reduksi data. Penyajian data ini melibatkan beberapa langkah, seperti:

- a. **Penyusunan Tematik:** Data yang telah dikelompokkan dalam tema-tema tertentu akan dipresentasikan dalam bentuk naratif. Misalnya, tema tentang strategi pengelolaan BUMDES akan diuraikan dengan menyajikan data yang menunjukkan bagaimana pengelola BUMDES merencanakan dan mengimplementasikan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Penyajian Hasil Wawancara:** Hasil wawancara dengan informan, seperti pengelola BUMDES, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya, akan dipaparkan secara sistematis. Hasil wawancara ini akan

dipresentasikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung yang menunjukkan pandangan atau pendapat informan mengenai pengelolaan BUMDES, penerapan ekonomi syariah, serta dampak yang dirasakan masyarakat.

- c. Penyajian Temuan Observasi: Data yang diperoleh dari observasi akan disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai kegiatan ekonomi yang berlangsung di BUMDES, interaksi antara pengelola dan masyarakat, serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih nyata dan konkrit tentang bagaimana BUMDES beroperasi di lapangan.

Dengan display data, peneliti dapat mengorganisir informasi yang telah disaring sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dibaca. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola yang muncul dari data dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel yang diteliti.

- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya) (Arikunto, 2018)

Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana BUMDES mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi data yang telah dianalisis dan memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan penelitian. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam proses penarikan kesimpulan antara lain:

- a. **Menghubungkan Temuan dengan Tujuan Penelitian:** Setelah data dipaparkan dan dianalisis, peneliti akan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana BUMDES dapat mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.
- b. **Identifikasi Pola dan Hubungan Antar Variabel:** Peneliti akan mencari pola-pola yang muncul dari data yang ada, misalnya hubungan antara penerapan ekonomi syariah dengan keberlanjutan usaha BUMDES, atau dampak BUMDES terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Analisis ini membantu peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih mendalam.

- c. Menarik Kesimpulan yang Berdasarkan Bukti: Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penarikan kesimpulan ini juga akan mencakup rekomendasi bagi pengelola BUMDES dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kinerja BUMDES dan keberlanjutan usahanya.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti akan merumuskan hasil temuan yang bersifat deskriptif **dan** analitis, yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta hubungan yang terjalin antara variabel-variabel yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh operasional unit usaha yang dikelola oleh desa. Menurut Ridlwan (2021), pengelolaan BUMDes yang efektif meliputi aspek kelembagaan yang jelas dan terstruktur, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan sistem manajemen keuangan yang transparan. Rahmatullah (2022) menekankan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik harus menerapkan prinsip partisipatif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Perspektif lain dikemukakan oleh Hakim (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes perlu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga aspek utama pengelolaan BUMDes yaitu tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta manajemen keuangan dan aset menjadi komponen fundamental yang saling terintegrasi dan menentukan keberhasilan BUMDes dalam mewujudkan perannya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola kelembagaan merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan BUMDes yang mencakup struktur organisasi, kejelasan pembagian

tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan yang diterapkan. Tata kelola kelembagaan yang baik menjamin berjalannya fungsi manajemen secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini juga meliputi legalitas kelembagaan, regulasi internal, serta hubungan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung operasional BUMDes.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"Secara struktur organisasi, BUMDes kami sudah memiliki kepengurusan yang lengkap dengan pembagian tugas yang jelas sesuai AD/ART yang disahkan pada tahun 2022. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tumpang tindih tugas karena keterbatasan personil aktif. Rapat koordinasi pengurus dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, tetapi tingkat kehadiran anggota masih belum optimal. Kami juga masih kesulitan dalam hal dokumentasi kegiatan dan pengarsipan yang tertib." (Budi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 20 Februari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BUMDes Desa Pendung Hiang telah memiliki struktur organisasi formal yang didukung dengan dokumen legalitas berupa AD/ART. Namun masih terdapat kesenjangan antara struktur formal dengan implementasi praktis di lapangan. Tumpang tindih tugas yang terjadi mengindikasikan belum efektifnya pembagian kerja dan koordinasi antar pengurus. Rutinitas rapat koordinasi yang telah dijadwalkan menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan fungsi manajemen, namun rendahnya tingkat partisipasi menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan kolektif. Kelemahan dalam sistem dokumentasi dan pengarsipan dapat mempengaruhi akuntabilitas dan evaluasi kinerja lembaga secara menyeluruh.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pendung Hiang, Bapak Firmanudin, mengungkapkan bahwa:

"Saya melihat BUMDes kita sudah ada kepengurusan, tapi belum berjalan maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang tahu apa saja program BUMDes dan bagaimana cara berpartisipasi di dalamnya. Pertemuan dengan warga untuk mendiskusikan arah pengembangan BUMDes juga jarang dilakukan. Seharusnya ada keterlibatan lebih banyak unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan, tidak hanya perangkat desa saja yang dominan." (Firmanudin, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 22 Februari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat desa. Minimnya sosialisasi program dan mekanisme partisipasi membuat BUMDes belum sepenuhnya menjadi lembaga yang inklusif. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya prinsip partisipatif dalam tata kelola BUMDes. Dominasi perangkat desa dalam pengambilan keputusan tanpa pelibatan aktif masyarakat luas dapat mengakibatkan program BUMDes kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kurangnya forum-forum dialog dengan masyarakat mencerminkan belum terbangunnya model tata kelola yang berbasis pada kepentingan kolektif warga desa.

Dari hasil observasi pada tanggal 5 Januari 2025, ditemukan bahwa kantor BUMDes Desa Pendung Hiang masih bergabung dengan kantor desa tanpa ruangan khusus yang memadai. Dokumen-dokumen penting seperti struktur organisasi, SOP, dan laporan kegiatan tidak tertata dengan baik dalam sistem pengarsipan. Papan informasi yang tersedia tidak memuat informasi terkini tentang kegiatan dan kinerja BUMDes. Berdasarkan pengamatan pada rapat pengurus yang berlangsung, terlihat bahwa proses pengambilan keputusan masih

sangat bergantung pada arahan kepala desa, dengan minimnya inisiatif dari pengurus BUMDes sendiri.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia menjadi dimensi krusial dalam pengelolaan BUMDes yang mengacu pada kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan pengelola dalam mengoperasikan unit usaha secara profesional. Aspek ini mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman, keterampilan manajerial, serta motivasi pengurus dalam mengembangkan BUMDes. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan, workshop, dan pendampingan menjadi faktor determinan dalam membangun profesionalisme pengelolaan BUMDes yang berdampak pada efektivitas program dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Pendung Hiang, Ibu Siti Hajar, mengungkapkan bahwa:

"Sebagian besar pengurus BUMDes kami berlatar belakang pendidikan SMA, hanya direktur dan bendahara yang lulusan S1. Kami sangat jarang mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan BUMDes. Terakhir kali ada pelatihan kewirausahaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar setahun lalu, itupun hanya diikuti oleh dua orang pengurus. Kami sebenarnya butuh pembekalan tentang manajemen usaha dan pemasaran produk lokal, karena masih banyak yang belum kami pahami dalam pengelolaan unit-unit usaha." (Siti Hajar, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 25 Februari 2025, Jam 09.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa kapasitas SDM pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang masih belum optimal dari segi kualifikasi pendidikan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan analisis dan pengelolaan yang bersifat strategis. Minimnya program

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan merupakan kendala signifikan yang menghambat pengembangan kompetensi pengelola. Distribusi pengetahuan yang tidak merata di antara pengurus, dengan hanya sebagian kecil yang mendapatkan pelatihan, menciptakan kesenjangan kapasitas internal. Kesadaran pengurus akan kebutuhan peningkatan keterampilan dalam bidang manajemen usaha dan pemasaran menunjukkan adanya motivasi untuk berkembang, namun belum terfasilitasi dengan baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pendung Hiang, Bapak Mahmud, mengungkapkan bahwa:

"Saya menyadari bahwa kapasitas pengurus BUMDes kita masih perlu ditingkatkan. Ada keterbatasan anggaran untuk program pengembangan SDM, sehingga belum semua pengurus mendapatkan pelatihan yang memadai. Kendala lain adalah beberapa pengurus memiliki pekerjaan utama lain, sehingga tidak bisa fokus sepenuhnya pada pengelolaan BUMDes. Ke depan, kami berencana mengalokasikan dana desa khusus untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk program pendampingan." (Mahmud, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 28 Februari 2025, Jam 13.20 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kesadaran dari pihak pemerintah desa mengenai urgensi peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM menjadi hambatan utama yang bersifat struktural. Fenomena pengurus yang memiliki pekerjaan rangkap mencerminkan belum adanya sistem insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan talenta yang fokus mengelola BUMDes. Rencana alokasi dana desa dan koordinasi dengan instansi lain menunjukkan adanya upaya konkret untuk mengatasi kesenjangan kapasitas, meskipun baru pada tahap perencanaan. Hal ini mengindikasikan perlunya

pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam pengembangan SDM pengelola BUMDes.

Dari hasil observasi pada tanggal 5 Januari 2025, terlihat bahwa pengurus BUMDes yang aktif hadir di kantor hanya sekitar 40% dari total struktur yang ada. Interaksi dengan pelanggan masih dilakukan secara konvensional tanpa memanfaatkan teknologi digital. Dalam proses pelayanan, terlihat beberapa pengelola masih kesulitan dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan sederhana. Tidak ditemukan adanya jadwal atau rencana pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam waktu dekat. Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas sebelumnya juga sangat minim, dengan hanya beberapa sertifikat pelatihan yang terpajang di kantor.

3. Manajemen Keuangan dan Aset

Manajemen keuangan dan aset merupakan dimensi penting dalam pengelolaan BUMDes yang berkaitan dengan sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan serta aset yang dimiliki. Aspek ini mencakup proses perencanaan anggaran, mekanisme transaksi keuangan, pengelolaan modal dan investasi, serta distribusi keuntungan yang dihasilkan. Manajemen keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel menjamin keberlanjutan operasional BUMDes serta memaksimalkan manfaat ekonomi yang dapat disalurkan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"Sistem keuangan BUMDes kami masih menggunakan pencatatan manual dan belum terkomputerisasi sepenuhnya. Kami memiliki buku kas dan

laporan keuangan sederhana, tapi belum menggunakan standar akuntansi yang baku. Modal awal BUMDes berasal dari dana desa sebesar Rp50 juta pada tahun 2022, dengan tambahan Rp25 juta pada tahun 2023. Untuk pelaporan keuangan, kami rutin menyampaikan kepada kepala desa setiap tiga bulan, tapi belum dipublikasikan secara luas ke masyarakat. Aset yang dimiliki BUMDes saat ini berupa satu unit kendaraan operasional dan peralatan pertanian untuk unit usaha sewa." (Budi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 Maret 2025, Jam 10.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa sistem manajemen keuangan BUMDes Desa Pendung Hiang masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi standar. Pencatatan manual tanpa dukungan sistem terkomputerisasi meningkatkan risiko ketidakakuratan data dan menghambat proses analisis keuangan yang lebih komprehensif. Modal yang bersumber dari dana desa menunjukkan komitmen pemerintah desa, namun belum ada diversifikasi sumber permodalan. Mekanisme pelaporan yang hanya bersifat internal kepada kepala desa tanpa publikasi luas mencerminkan tingkat transparansi yang masih terbatas. Inventarisasi aset yang dimiliki sudah dilakukan meskipun dalam skala yang masih relatif kecil dan belum dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan maksimal.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Masyarakat Pengguna BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Hantes, mengungkapkan bahwa:

"Saya sering menggunakan layanan sewa alat pertanian dari BUMDes, sistem pembayarannya cukup sederhana dengan harga yang terjangkau. Namun, kadang pencatatan transaksi tidak langsung dibuatkan kuitansi, hanya dicatat di buku. Masyarakat juga tidak pernah tahu berapa keuntungan BUMDes dan bagaimana pembagiannya. Seharusnya ada laporan yang bisa diakses masyarakat tentang kondisi keuangan BUMDes ini, karena modalnya kan dari dana desa yang sebenarnya adalah uang rakyat juga." (Hantes, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025, Jam 15.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa layanan BUMDes telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau, menunjukkan orientasi sosial lembaga ini. Namun, kelemahan dalam sistem administrasi transaksi berupa tidak konsistennya pemberian bukti pembayaran formal mencerminkan belum standardnya prosedur keuangan. Rendahnya transparansi mengenai performa keuangan dan mekanisme bagi hasil ke masyarakat menimbulkan kesenjangan informasi. Kesadaran masyarakat bahwa BUMDes dimodali dari dana publik menunjukkan pemahaman akan hak mereka untuk mendapatkan informasi pengelolaan keuangan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan BUMDes.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pendung Hiang, Bapak Burhan, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Sebagai tokoh masyarakat, saya perhatikan BUMDes kita belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi keuangan yang seharusnya. Dalam Islam, pengelolaan harta publik harus amanah dan terbuka. BUMDes perlu mengadakan forum khusus untuk memaparkan kondisi keuangan kepada masyarakat secara berkala. Selain itu, distribusi keuntungan juga harus adil dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Kalau bisa, sistem bagi hasilnya juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih berkeadilan." (Burhan, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 16.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat ekspektasi dari tokoh agama akan penerapan prinsip-prinsip religius dalam pengelolaan keuangan BUMDes, khususnya nilai amanah dan transparansi. Gagasan forum khusus untuk pemaparan kondisi keuangan secara berkala merupakan usulan konkret untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Pandangan

mengenai distribusi keuntungan yang berkeadilan dengan prioritas pada kelompok rentan mencerminkan harapan akan fungsi sosial BUMDes, tidak semata berorientasi profit. Usulan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam mekanisme bagi hasil menunjukkan adanya aspirasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan religius dalam sistem manajemen keuangan BUMDes.

Dari hasil observasi pada tanggal 5 Januari 2025, ditemukan bahwa sistem pencatatan keuangan BUMDes masih dilakukan secara manual dalam buku kas umum. Tidak ditemukan adanya software akuntansi atau sistem informasi manajemen keuangan. Bukti-bukti transaksi tidak diarsipkan dengan sistematis, dan beberapa transaksi tidak disertai dengan dokumen pendukung yang memadai. Laporan keuangan terakhir yang tersedia adalah periode semester pertama tahun 2024, menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaporan. Tidak terdapat papan informasi yang menampilkan ringkasan kinerja keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Analisis Keseluruhan Pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang

Pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam tiga aspek fundamental. Pada dimensi tata kelola kelembagaan, meskipun telah memiliki struktur organisasi formal dan AD/ART yang disahkan, implementasinya belum berjalan optimal dengan masih terjadinya tumpang tindih tugas dan rendahnya tingkat partisipasi pengurus dalam rapat koordinasi. Kesenjangan komunikasi antara pengelola dengan masyarakat desa menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi warga dalam program BUMDes. Proses

pengambilan keputusan masih didominasi oleh perangkat desa dengan minimnya pelibatan aktif masyarakat luas, sehingga prinsip partisipatif belum sepenuhnya terwujud.

Dari aspek kapasitas sumber daya manusia, teridentifikasi bahwa kualifikasi pendidikan pengurus mayoritas masih pada tingkat menengah dengan minimnya program peningkatan kompetensi. Distribusi pengetahuan yang tidak merata di antara pengurus, dengan hanya sebagian kecil yang memperoleh pelatihan, menciptakan kesenjangan kapasitas internal. Fenomena pengurus yang memiliki pekerjaan rangkap menunjukkan belum adanya sistem insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan talenta yang fokus mengelola BUMDes. Meskipun terdapat kesadaran dari pemerintah desa mengenai pentingnya peningkatan kapasitas pengelola, keterbatasan anggaran menjadi hambatan struktural yang signifikan.

Dalam hal manajemen keuangan dan aset, pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa mengadopsi standar akuntansi yang baku, sehingga meningkatkan risiko ketidakakuratan data dan menghambat analisis keuangan komprehensif. Transparansi pengelolaan keuangan masih terbatas, dengan pelaporan yang hanya bersifat internal kepada kepala desa tanpa publikasi luas kepada masyarakat. Mekanisme distribusi keuntungan belum sepenuhnya jelas dan belum ada forum khusus untuk memaparkan kondisi keuangan kepada masyarakat secara berkala. Aset yang dimiliki BUMDes masih relatif terbatas dan belum dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan maksimal.

Secara keseluruhan, pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang masih berada pada tahap perkembangan awal yang membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek. Meskipun telah memberikan layanan dasar kepada masyarakat dengan biaya terjangkau, belum ada dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara luas. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif dalam membangun fondasi tata kelola kelembagaan yang partisipatif, meningkatkan kapasitas SDM pengelola secara berkelanjutan, serta mengembangkan sistem manajemen keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, BUMDes dapat mengoptimalkan potensinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Pendung Hiang.

2. Potensi ekonomi di Desa Pendung Hiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

Potensi ekonomi desa merupakan keseluruhan daya, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wibowo (2022), potensi ekonomi desa terdiri dari berbagai aspek meliputi sumber daya alam, pertanian, UMKM, serta infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi yang dapat dioptimalkan menjadi keunggulan kompetitif desa. Hastuti (2023) mendefinisikan potensi ekonomi desa sebagai kapasitas produktif yang tersedia di wilayah pedesaan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dioptimalkan. Sementara itu, Priyono (2021) menekankan bahwa potensi ekonomi desa perlu diidentifikasi dan dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan

partisipasi aktif masyarakat untuk menghasilkan dampak maksimal bagi peningkatan kesejahteraan. Ketiga aspek utama potensi ekonomi desa yaitu sumber daya alam dan pertanian, UMKM, serta infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi merupakan komponen yang saling terkait dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian

Potensi sumber daya alam dan pertanian merupakan keseluruhan kekayaan alam yang terdapat di Desa Pendung Hiang, baik berupa lahan pertanian, hutan, sumber air, keanekaragaman hayati, hingga potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Dimensi ini mencakup ketersediaan lahan, jenis komoditas unggulan yang dikembangkan, praktik pertanian yang diterapkan, serta nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Pengembangan potensi sumber daya alam dan pertanian secara berkelanjutan dapat menjadi fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"Desa Pendung Hiang memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Sekitar 65% lahan di desa kami merupakan lahan produktif dengan komoditas utama berupa padi sawah, kopi, dan kayu manis. Produktivitas lahan cukup baik dengan rata-rata hasil panen padi mencapai 4,8 ton per hektar. Ada juga potensi pengembangan tanaman hortikultura seperti cabai dan sayuran organik yang mulai dirintis beberapa petani muda. Sayangnya, pengelolaan pasca panen masih menjadi kendala utama, sehingga nilai tambah produk pertanian belum optimal. BUMDes pernah mencoba mengembangkan unit pengolahan kopi, tapi terkendala modal dan

peralatan." (Budi, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa Desa Pendung Hiang memiliki basis pertanian yang kuat dengan dominasi lahan produktif mencapai 65% dari total wilayah desa. Komoditas unggulan yang beragam mulai dari tanaman pangan (padi) hingga tanaman perkebunan (kopi dan kayu manis) menunjukkan adanya diversifikasi produk pertanian. Produktivitas padi yang mencapai 4,8 ton per hektar menggambarkan tingkat kesuburan lahan yang relatif baik. Munculnya inisiasi pengembangan hortikultura oleh petani muda menandakan adanya semangat inovasi dalam sektor pertanian. Namun, permasalahan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian masih menjadi hambatan utama dalam penciptaan nilai tambah. Upaya BUMDes untuk mengembangkan unit pengolahan terkendala oleh keterbatasan modal dan teknologi yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian yang ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pendung Hiang, Bapak Firmanudin, mengungkapkan bahwa:

"Sumber daya alam di desa kita ini sangat kaya. Selain pertanian, kita punya sumber mata air yang berlimpah di bagian utara desa yang bisa dikembangkan untuk pertanian berkelanjutan bahkan potensi wisata alam. Hutan desa kita juga masih cukup luas sekitar 120 hektar dengan berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti durian, petai, dan jengkol yang tumbuh alami. Kita juga punya hamparan persawahan dengan pemandangan yang indah dan berpotensi untuk agrowisata. Sayang sekali, potensi ini belum dikelola dengan baik, padahal bisa jadi sumber pendapatan tambahan bagi warga." (Firmanudin, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa kekayaan sumber daya alam Desa Pendung Hiang tidak hanya terbatas pada lahan pertanian, tetapi juga sumber daya air yang berlimpah dan kawasan hutan yang masih terjaga. Potensi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam teridentifikasi dari gagasan pengembangan wisata alam dan agrowisata. Keberadaan hutan desa seluas 120 hektar dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tumbuh secara alami menunjukkan potensi pengembangan hasil hutan non-kayu yang berkelanjutan. Pemandangan persawahan yang indah menjadi aset non-fisik yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis alam. Pandangan kritis mengenai belum terkelolanya potensi tersebut mencerminkan kesadaran akan adanya peluang diversifikasi sumber pendapatan masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan bahwa lahan pertanian di Desa Pendung Hiang didominasi oleh tanaman padi sawah dengan sistem irigasi semi-teknis. Terdapat sekitar 15 hektar lahan perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat dengan varietas robusta dan arabika yang ditanam pada ketinggian 800-1200 mdpl. Tanaman kayu manis juga ditemukan tersebar di beberapa lokasi dengan pola tanam campur. Beberapa petani mulai mencoba budidaya sayuran organik pada lahan pekarangan dengan berbagai jenis sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi. Sumber mata air yang berlimpah di bagian utara desa mengalir sepanjang tahun melalui beberapa aliran sungai kecil yang melintasi area persawahan. Beberapa titik di kawasan hutan desa memiliki

pemandangan yang indah dengan air terjun kecil yang belum dikelola sebagai destinasi wisata.

2. Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan keberadaan dan kapasitas usaha berskala kecil dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat Desa Pendung Hiang, baik yang sudah berkembang maupun yang masih dalam tahap inisiasi. Dimensi ini mencakup jenis usaha yang dijalankan, skala produksi, nilai ekonomi yang dihasilkan, serta tingkat daya saing produk UMKM lokal. Pengembangan UMKM yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Pendung Hiang, Ibu Siti Hajar, mengungkapkan bahwa:

"UMKM di desa kami cukup beragam meskipun masih berskala kecil. Ada sekitar 15 unit usaha pengolahan makanan berbasis hasil pertanian seperti keripik pisang, dodol durian, dan kue tradisional. Kemudian ada 7 pengrajin anyaman bambu dan rotan yang membuat berbagai produk seperti tas, tempat tisu, dan hiasan dinding. Beberapa ibu rumah tangga juga membentuk kelompok bordir dan sulaman tradisional dengan motif khas Jambi. Tantangannya adalah pemasaran produk yang masih terbatas di pasar lokal dan belum memiliki kemasan yang menarik. Beberapa UMKM sudah mencoba pemasaran online tapi masih terkendala pengetahuan digital dan akses internet." (Siti Hajar, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2025, Jam 09.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa ekosistem UMKM di Desa Pendung Hiang menunjukkan keanekaragaman jenis

usaha yang berbasis pada potensi lokal, mulai dari pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga tekstil tradisional. Keberadaan 15 unit usaha pengolahan makanan mengindikasikan adanya upaya untuk menciptakan nilai tambah dari hasil pertanian. Pemanfaatan keterampilan tradisional dalam pembuatan anyaman bambu, rotan, dan sulaman menunjukkan upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus menjadikannya sebagai sumber ekonomi. Pembentukan kelompok usaha oleh ibu rumah tangga mencerminkan adanya semangat kewirausahaan dari kalangan perempuan. Namun, tantangan signifikan teridentifikasi pada aspek pemasaran yang masih terbatas serta belum optimalnya kemasan produk. Upaya pemasaran digital yang terkendala literasi teknologi dan infrastruktur menggambarkan adanya kesenjangan digital yang perlu diatasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pendung Hiang, Bapak Mahmud, mengungkapkan bahwa:

"UMKM di desa kita memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama yang berbasis kearifan lokal. Salah satu yang paling menonjol adalah kerajinan tenun songket khas Jambi yang ditekuni oleh sekitar 10 pengrajin di Dusun Tanjung. Produk mereka sebenarnya memiliki nilai jual tinggi, tapi belum banyak yang tahu. Kami sudah mencoba memfasilitasi pelatihan manajemen usaha dan pemasaran bekerjasama dengan Dinas Koperasi tahun lalu. Ke depan, kami berencana mengalokasikan dana desa untuk pengembangan sentra UMKM yang terintegrasi dengan BUMDes. Harapannya, BUMDes bisa menjadi penampung dan pemasaran produk UMKM lokal." (Mahmud, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2025, Jam 13.20 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah desa memiliki optimisme terhadap potensi pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Keberadaan 10 pengrajin tenun songket di Dusun Tanjung menggambarkan adanya konsentrasi

keterampilan khusus yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan desa. Identifikasi permasalahan mengenai produk yang belum dikenal luas menunjukkan adanya kesenjangan dalam strategi branding dan pemasaran. Upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah desa mencerminkan komitmen dalam mendukung pengembangan sektor ini. Rencana pengalokasian dana desa untuk pembangunan sentra UMKM dan pengintegrasian dengan BUMDes menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun ekosistem usaha yang saling mendukung. Visi menjadikan BUMDes sebagai agregator produk UMKM lokal mengindikasikan adanya strategi untuk memperkuat rantai nilai produk desa.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan beberapa unit UMKM yang beroperasi di Desa Pendung Hiang. Terdapat 6 unit usaha pengolahan makanan yang aktif berproduksi dengan kondisi tempat produksi yang masih sederhana dan belum memenuhi standar PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Produk kerajinan anyaman bambu dan rotan terlihat memiliki kualitas yang baik dengan motif khas daerah, namun belum memiliki kemasan dan label yang memadai. Kelompok pengrajin tenun songket di Dusun Tanjung memiliki 5 alat tenun tradisional dengan 10 pengrajin aktif, namun produksinya masih terbatas dan hanya berdasarkan pesanan. Beberapa pelaku UMKM sudah mencoba memasarkan produknya melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, namun belum terkelola secara profesional. Tidak ditemukan adanya koperasi atau sentra UMKM yang dapat menjadi wadah kolektif bagi para pelaku usaha di desa.

3. Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi

Infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi mencakup ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Pendung Hiang. Dimensi ini meliputi kondisi jalan, jembatan, sarana transportasi, jaringan telekomunikasi, akses listrik, pasar, serta fasilitas lain yang menunjang distribusi barang dan jasa. Selain itu, aksesibilitas ekonomi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar, modal, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"Infrastruktur di desa kami sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dasar. Akses jalan utama sudah beraspal meskipun beberapa jalan ke area pertanian masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui saat musim hujan. Listrik sudah menjangkau hampir 95% rumah warga, tapi jaringan internet masih terbatas di beberapa titik saja. Untuk pasar, kami belum memiliki pasar desa, sehingga warga harus pergi ke pasar kecamatan yang berjarak sekitar 7 km untuk menjual hasil pertanian atau membeli kebutuhan. BUMDes sebenarnya punya rencana untuk mengembangkan pasar desa mini, tapi masih terkendala lahan dan modal." (Budi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2025, Jam 10.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa infrastruktur dasar di Desa Pendung Hiang sudah tersedia namun belum sepenuhnya optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Kondisi jalan utama yang sudah beraspal menunjukkan adanya konektivitas dasar,

namun akses ke area pertanian yang masih berupa jalan tanah menjadi hambatan dalam distribusi hasil produksi terutama saat musim hujan. Cakupan jaringan listrik yang mencapai 95% merupakan modal penting untuk pengembangan usaha, meskipun keterbatasan jaringan internet dapat menghambat akses terhadap pasar digital dan informasi. Ketiadaan pasar desa menjadi kendala signifikan dalam sistem distribusi produk lokal, dengan jarak 7 km ke pasar kecamatan yang dapat meningkatkan biaya transportasi dan mengurangi margin keuntungan petani dan pelaku UMKM. Rencana pengembangan pasar desa mini oleh BUMDes menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya fasilitas pemasaran lokal, meskipun masih terkendala pada aspek lahan dan pendanaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Masyarakat Pengguna BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Hantes, mengungkapkan bahwa:

"Sebagai petani, kendala utama kami adalah transportasi hasil panen. Jalan menuju lahan pertanian masih buruk dan saat musim hujan sering tidak bisa dilalui kendaraan. Ini membuat biaya angkut menjadi tinggi dan kadang buah-buahan seperti durian dan manggis jadi rusak sebelum sampai ke pasar. Selain itu, kami juga kesulitan mendapatkan informasi harga pasar yang akurat. Harga sering ditentukan sepihak oleh tengkulak yang datang ke desa. Untuk akses permodalan, bank terdekat ada di kota yang jaraknya sekitar 15 km. BUMDes seharusnya bisa membantu dengan menyediakan transportasi atau sistem informasi harga untuk petani." (Hantes, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2025, Jam 15.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa infrastruktur transportasi khususnya akses jalan ke area pertanian masih menjadi kendala utama bagi aktivitas ekonomi petani. Kondisi jalan yang buruk terutama saat musim hujan berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan kerusakan produk pertanian sebelum mencapai pasar. Kesenjangan informasi

pasar teridentifikasi sebagai permasalahan struktural yang menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah dalam rantai nilai pertanian, dengan harga yang sering dikuasai oleh tengkulak. Keterbatasan akses terhadap layanan perbankan dengan jarak 15 km ke bank terdekat mencerminkan adanya hambatan dalam mengakses layanan finansial formal. Ekspektasi terhadap peran BUMDes dalam menyediakan solusi transportasi dan sistem informasi harga menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap intervensi lembaga ekonomi desa dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur dan informasi pasar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pendung Hiang, Bapak Burhan, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Aksesibilitas ekonomi bukan hanya soal jalan dan pasar, tapi juga akses terhadap pendidikan dan pengetahuan ekonomi. Masyarakat kita masih banyak yang belum paham bagaimana mengelola keuangan dengan baik atau bagaimana mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Fasilitas pendidikan di desa memang sudah ada hingga tingkat SMP, tapi tidak ada pelatihan keterampilan atau pendidikan non-formal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam pandangan agama, mencari ilmu itu wajib termasuk ilmu untuk mengembangkan ekonomi. BUMDes seharusnya bisa menjadi pusat pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat, tidak hanya fokus pada keuntungan semata." (Burhan, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 3 Maret 2025, Jam 16.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa konsep aksesibilitas ekonomi perlu dipahami secara lebih luas, tidak terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan dan pengetahuan ekonomi. Identifikasi adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha menunjukkan perlunya penguatan kapasitas non-teknis masyarakat. Keberadaan fasilitas pendidikan formal hingga tingkat SMP tanpa didukung pendidikan non-

formal bidang ekonomi mencerminkan belum adanya sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan ekonomi lokal. Perspektif religius yang disampaikan mengenai kewajiban mencari ilmu termasuk ilmu ekonomi menunjukkan adanya dukungan nilai-nilai spiritual terhadap upaya peningkatan kapasitas ekonomi. Harapan terhadap BUMDes sebagai pusat pengembangan kapasitas ekonomi mencerminkan visi bahwa lembaga ekonomi desa tidak semata berfungsi sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan bahwa Desa Pendung Hiang memiliki jalan utama sepanjang 3 km yang sudah beraspal, namun sekitar 60% jalan desa masih berupa jalan tanah dan kerikil. Akses jalan menuju lahan pertanian umumnya berupa jalan setapak yang sulit dilalui kendaraan roda empat. Jaringan listrik telah menjangkau sebagian besar rumah warga, dengan hanya sekitar 5% rumah di daerah terpencil yang belum terjangkau. Sinyal telepon seluler tersedia di area pusat desa namun lemah di beberapa dusun yang jauh dari pusat. Akses internet hanya tersedia di sekitar balai desa dan beberapa warung kopi yang menyediakan WiFi. Tidak ditemukan adanya pasar desa, koperasi, atau lembaga keuangan mikro yang beroperasi di dalam desa. Bank terdekat berada di kota kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 15 km. Sebagai sarana pendukung ekonomi, terdapat satu unit traktor komunal yang dikelola oleh kelompok tani dan dua kendaraan angkutan desa (pick-up) yang dapat disewa warga untuk mengangkut hasil pertanian.

Potensi ekonomi Desa Pendung Hiang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kekayaan sumber daya yang belum dioptimalkan sepenuhnya. Pada dimensi potensi sumber daya alam dan pertanian, desa ini memiliki kekuatan berupa lahan produktif yang mencapai 65% dari total wilayah dengan komoditas unggulan padi, kopi, dan kayu manis. Produktivitas padi yang relatif baik mencapai 4,8 ton per hektar menunjukkan tingkat kesuburan lahan yang memadai. Potensi pengembangan tanaman hortikultura dan inisiasi pertanian organik oleh petani muda mencerminkan adanya dinamika positif dalam sektor pertanian. Keberadaan sumber mata air yang berlimpah dan kawasan hutan desa seluas 120 hektar dengan berbagai tanaman bernilai ekonomi tinggi merupakan aset alamiah yang dapat dikembangkan tidak hanya untuk pertanian tetapi juga untuk wisata alam dan agrowisata. Meskipun demikian, permasalahan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian masih menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan nilai tambah dari potensi pertanian yang ada.

Dalam aspek UMKM, terdapat keragaman jenis usaha yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal, mulai dari pengolahan hasil pertanian, kerajinan anyaman bambu dan rotan, hingga tekstil tradisional berupa tenun songket khas Jambi. Keberadaan 15 unit usaha pengolahan makanan, 7 pengrajin anyaman, dan 10 pengrajin tenun songket menunjukkan adanya basis ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam kelompok usaha bordir dan sulaman tradisional mencerminkan potensi pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, tantangan signifikan teridentifikasi pada aspek

pemasaran yang masih terbatas pada pasar lokal, kemasan produk yang belum menarik, serta literasi digital yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Infrastruktur produksi yang masih sederhana dan belum memenuhi standar juga menjadi kendala dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM lokal.

Dari segi infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi, meskipun jalan utama desa sudah beraspal dan listrik telah menjangkau 95% rumah warga, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang menghambat aktivitas ekonomi. Kondisi jalan menuju lahan pertanian yang masih berupa jalan tanah dan sulit dilalui saat musim hujan menyebabkan tingginya biaya distribusi dan kerusakan produk pertanian sebelum mencapai pasar. Ketiadaan pasar desa menjadi kendala signifikan dalam sistem distribusi produk lokal, dengan jarak 7 km ke pasar kecamatan yang meningkatkan biaya transportasi. Keterbatasan akses terhadap informasi pasar, layanan perbankan, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara maksimal.

Secara keseluruhan, potensi ekonomi Desa Pendung Hiang memiliki basis yang kuat terutama pada sektor pertanian dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Upaya pengembangan potensi ekonomi desa perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian, penguatan kapasitas UMKM, serta perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi. BUMDes dapat menjadi instrumen strategis dalam mengkoordinasikan

berbagai potensi ekonomi yang ada melalui pengembangan unit usaha yang relevan, fasilitasi pemasaran produk lokal, serta penyediaan layanan yang dapat mengatasi kesenjangan infrastruktur dan informasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, potensi ekonomi Desa Pendung Hiang dapat dioptimalkan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

3. Peran BUMDes dalam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan aktualisasi fungsi kelembagaan ekonomi desa dalam menciptakan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Wijaya (2022), peran BUMDes meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan pemberdayaan yang diimplementasikan melalui berbagai unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Sulistyowati (2023) mendefinisikan peran BUMDes sebagai katalisator yang menggerakkan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, dan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Sementara itu, Rahardjo (2021) menekankan bahwa efektivitas peran BUMDes ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Ketiga aspek utama peran BUMDes yaitu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan asli desa dan pembangunan merupakan manifestasi konkret dari fungsi BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

1. Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan merupakan aspek fundamental dari peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimensi ini mengukur sejauh mana keberadaan BUMDes mampu menghasilkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat desa, baik secara langsung melalui pengelolaan unit usaha maupun secara tidak langsung melalui efek multiplier ekonomi. Selain itu, dimensi ini juga mengevaluasi dampak operasional BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi sumber penghasilan, dan pengurangan tingkat kemiskinan di desa. Keberhasilan BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan menjadi indikator penting dalam mengukur kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"BUMDes kami saat ini mengelola tiga unit usaha yaitu penyewaan alat pertanian, penggilingan padi, dan simpan pinjam. Dari ketiga unit usaha ini, kami mempekerjakan 7 orang warga desa sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil. Untuk unit penyewaan alat pertanian, selain menciptakan lapangan kerja bagi operator, juga membantu petani meningkatkan produktivitas dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding harus menyewa dari luar desa. Unit penggilingan padi mempekerjakan 3 orang dengan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Untuk unit simpan pinjam, meskipun baru berjalan setahun, sudah membantu sekitar 25 keluarga mengembangkan usaha mikro dengan bunga yang lebih rendah dari rentenir." (Budi, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BUMDes Desa Pendung Hiang telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja langsung bagi 7 warga desa melalui tiga unit usaha operasionalnya. Sistem

bagi hasil yang diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan pola kemitraan antara BUMDes dengan pengelola unit usaha. Unit penyewaan alat pertanian tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi operator tetapi juga memberikan efek tidak langsung berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya bagi petani. Unit penggilingan padi mampu memberikan pendapatan tetap sekitar Rp1,5 juta per bulan bagi 3 tenaga kerja, meskipun masih relatif terbatas jumlahnya. Unit simpan pinjam yang baru berjalan setahun menunjukkan peran BUMDes dalam memfasilitasi akses permodalan bagi 25 keluarga dengan bunga yang kompetitif, sehingga berpotensi mendorong pengembangan ekonomi mikro dan mengurangi ketergantungan pada praktik rentenir.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pendung Hiang, Bapak Firmanudin, mengungkapkan bahwa:

"Saya melihat BUMDes belum maksimal dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dari sekitar 350 kepala keluarga di desa kita, yang terserap menjadi pekerja BUMDes hanya sedikit. Harusnya BUMDes bisa mengembangkan lebih banyak unit usaha yang menyerap tenaga kerja seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan. Untuk peningkatan pendapatan, memang ada beberapa keluarga yang terbantu dengan adanya unit simpan pinjam, tapi dampaknya belum signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di desa kita yang masih sekitar 30%. Banyak pemuda desa yang masih harus merantau karena terbatasnya lapangan kerja di desa." (Firmanudin, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa penciptaan lapangan kerja oleh BUMDes Desa Pendung Hiang masih belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di desa. Kesenjangan yang besar antara 7 pekerja yang terserap BUMDes dengan 350 kepala keluarga menunjukkan masih terbatasnya skala usaha yang dikelola.

Identifikasi potensi pengembangan unit usaha berbasis pengolahan hasil pertanian dan kerajinan menunjukkan adanya peluang ekspansi yang belum dimanfaatkan. Unit simpan pinjam yang telah berjalan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di desa yang masih mencapai 30%. Fenomena migrasi pemuda desa untuk mencari pekerjaan di luar daerah menjadi indikator belum terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan bahwa unit usaha BUMDes yang aktif beroperasi memang terbatas pada tiga unit sebagaimana disebutkan dalam wawancara. Unit penyewaan alat pertanian memiliki 2 traktor tangan, 1 mesin perontok padi, dan beberapa alat pertanian lainnya yang dioperasikan oleh 2 orang operator. Unit penggilingan padi berlokasi di dekat area persawahan dengan fasilitas yang cukup terawat dan dikelola oleh 3 orang pekerja. Unit simpan pinjam beroperasi di kantor BUMDes dengan sistem administrasi yang masih sederhana dan dikelola oleh 2 orang staf. Ditemukan juga adanya beberapa usaha mikro seperti warung kelontong dan produksi makanan ringan yang mendapatkan pinjaman modal dari BUMDes. Namun, belum terlihat adanya unit usaha pengolahan hasil pertanian atau kerajinan yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja. Secara umum, aktivitas ekonomi di desa masih didominasi oleh sektor pertanian subsisten dengan nilai tambah yang rendah.

2. Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan usaha berbasis potensi lokal merupakan aspek strategis dari peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimensi ini mengukur kemampuan BUMDes dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal menjadi unit usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Aspek ini mencakup inovasi produk dan layanan, strategi pemasaran, serta pengembangan rantai nilai yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan identitas dan kemandirian ekonomi desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Anggota BUMDes Desa Pendung Hiang, Ibu Siti Hajar, mengungkapkan bahwa:

"BUMDes kami sebenarnya memiliki rencana untuk mengembangkan unit usaha pengolahan kopi dan kerajinan tenun songket khas Jambi yang menjadi potensi unggulan desa. Beberapa kali kami sudah melakukan studi banding ke desa lain yang berhasil mengembangkan produk serupa. Untuk kopi, kami sudah memiliki mesin sangrai sederhana dan beberapa peralatan seduh kopi untuk memulai kafe kecil di balai desa. Untuk tenun songket, BUMDes berencana menjadi agregator yang menampung hasil produksi pengrajin lokal dan membantu pemasarannya. Kendala utama kami adalah keterbatasan modal dan SDM yang memahami standar produksi dan strategi pemasaran produk tersebut." (Siti Hajar, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2025, Jam 09.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BUMDes telah mengidentifikasi potensi lokal unggulan berupa kopi dan tenun songket khas Jambi sebagai basis pengembangan unit usaha baru. Upaya studi banding ke desa lain menunjukkan adanya kemauan untuk belajar dari praktik baik yang telah berhasil diterapkan di tempat lain. Inisiasi awal berupa pengadaan

mesin sangrai dan peralatan seduh kopi mencerminkan langkah konkret meskipun masih dalam skala terbatas. Rencana menjadi agregator produk tenun songket menunjukkan pemahaman tentang peran BUMDes sebagai penghubung antara produsen lokal dengan pasar yang lebih luas. Identifikasi kendala berupa keterbatasan modal dan SDM yang memahami standar produksi dan strategi pemasaran menggambarkan tantangan struktural yang dihadapi dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Hal ini mencerminkan perlunya dukungan eksternal baik dalam bentuk permodalan maupun peningkatan kapasitas untuk merealisasikan potensi pengembangan usaha tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pendung Hiang, Bapak Mahmud, mengungkapkan bahwa:

"Kami mendukung pengembangan usaha BUMDes berbasis potensi lokal dengan mengalokasikan dana desa untuk penguatan kapasitas pengelola. Tahun lalu, kami mengirim dua orang pengurus BUMDes untuk pelatihan pengolahan kopi di Kabupaten Kerinci. Potensi desa kita yang belum tergarap adalah agrowisata, mengingat pemandangan persawahan dan perkebunan kopi kita sangat indah. BUMDes seharusnya bisa mengelola homestay sederhana dan paket wisata petik kopi yang melibatkan petani lokal. Kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan dinas pariwisata untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Tantangannya adalah kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata yang masih baru bagi mereka." (Mahmud, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2025, Jam 13.20 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan usaha BUMDes berbasis potensi lokal melalui alokasi dana desa bagi penguatan kapasitas pengelola. Inisiatif mengirimkan pengurus BUMDes untuk pelatihan pengolahan kopi mencerminkan upaya peningkatan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pengembangan unit usaha baru. Identifikasi potensi agrowisata

sebagai peluang ekonomi yang belum tergarap menunjukkan adanya visi strategis dalam diversifikasi basis ekonomi desa. Gagasan pengembangan homestay dan paket wisata petik kopi merupakan inovasi yang dapat menciptakan rantai nilai baru dengan melibatkan petani lokal. Upaya menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan eksternal dan jejaring institusional dalam pengembangan desa wisata. Identifikasi tantangan berupa kesiapan masyarakat mengindikasikan perlunya proses pendampingan dan edukasi untuk memastikan partisipasi aktif warga dalam inisiatif pengembangan ekonomi baru.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan bahwa BUMDes memiliki beberapa peralatan pengolahan kopi yang disimpan di gudang balai desa, namun belum dioperasikan secara optimal. Terdapat sebuah mesin sangrai berkapasitas 5 kg dan beberapa peralatan seduh kopi manual yang masih dalam kondisi baik. Di desa terdapat sekitar 15 hektar kebun kopi arabika dan robusta yang dikelola oleh petani secara tradisional dengan hasil panen yang dijual dalam bentuk biji kopi kering tanpa pengolahan lebih lanjut. Untuk tenun songket, terdapat 10 pengrajin aktif yang bekerja secara individual di rumah masing-masing dengan alat tenun tradisional. Produk yang dihasilkan memiliki motif khas Jambi dengan kualitas yang baik, namun masih dijual melalui tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Potensi agrowisata terlihat dari keindahan lanskap persawahan terasering dan kebun kopi di lereng perbukitan, namun belum ada infrastruktur pendukung pariwisata seperti homestay, jalur tracking, atau pusat informasi wisata.

3. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pembangunan merupakan aspek strategis dari peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dimensi ini mengukur kemampuan BUMDes dalam menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan ke kas desa sebagai sumber pendapatan asli desa, serta kontribusinya dalam mendukung program pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Aspek ini juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan distribusi keuntungan, serta dampak sosial-ekonomi dari investasi pembangunan yang dilakukan melalui kontribusi BUMDes. Keberhasilan BUMDes dalam memberikan kontribusi terhadap PADes dan pembangunan mencerminkan keberlanjutan perannya sebagai motor penggerak kemajuan desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Budi, mengungkapkan bahwa:

"Dari tiga unit usaha yang kami kelola, pendapatan BUMDes tahun 2024 mencapai sekitar Rp48 juta. Sesuai AD/ART, 25% dari keuntungan atau sekitar Rp12 juta kami setorkan ke kas desa sebagai PADes. Jumlah ini memang masih kecil dibandingkan total anggaran desa yang mencapai Rp1,2 miliar per tahun. Pembagian keuntungan lainnya dialokasikan untuk pengembangan usaha 40%, cadangan modal 20%, dan dana sosial 15%. Dana sosial kami gunakan untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan bantuan kesehatan. Kendala kami adalah skala usaha yang masih kecil dan belum optimalnya unit usaha dalam menghasilkan keuntungan. Tahun ini kami menargetkan peningkatan kontribusi PADes menjadi Rp20 juta." (Budi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2025, Jam 10.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa masih relatif kecil dengan nilai Rp12 juta atau hanya sekitar 1% dari total anggaran desa sebesar Rp1,2

miliar per tahun. Keberadaan AD/ART yang mengatur proporsi pembagian keuntungan menunjukkan adanya mekanisme formal dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Alokasi 40% keuntungan untuk pengembangan usaha mencerminkan orientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan skala usaha di masa depan. Pemanfaatan dana sosial untuk program beasiswa dan bantuan kesehatan menunjukkan adanya dimensi sosial dalam operasional BUMDes meskipun dalam jumlah yang terbatas. Identifikasi kendala berupa skala usaha yang masih kecil dan belum optimalnya performa unit usaha mengindikasikan perlunya penguatan aspek manajerial dan inovasi bisnis. Target peningkatan kontribusi PADes menjadi Rp20 juta menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan peran BUMDes dalam memperkuat kemandirian fiskal desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Masyarakat Pengguna BUMDes Desa Pendung Hiang, Bapak Hantes, mengungkapkan bahwa:

"Saya belum merasakan kontribusi signifikan dari BUMDes untuk pembangunan desa. Memang ada bantuan berupa beasiswa untuk beberapa anak tidak mampu, tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Masyarakat juga belum pernah mendapatkan laporan komprehensif tentang berapa keuntungan BUMDes dan bagaimana penggunaannya. Seharusnya, keuntungan BUMDes bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan pertanian yang rusak atau membangun saluran irigasi yang lebih baik untuk meningkatkan hasil pertanian. BUMDes juga harusnya memberikan kontribusi untuk kegiatan masyarakat seperti peringatan hari besar dan kegiatan pemberdayaan perempuan di desa." (Hantes, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2025, Jam 15.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat belum merasakan dampak signifikan dari kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa. Program bantuan beasiswa yang telah dijalankan dianggap masih sangat terbatas cakupannya sehingga belum memberikan manfaat

luas. Identifikasi adanya kesenjangan informasi mengenai laporan keuangan BUMDes menunjukkan belum optimalnya aspek transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Pandangan mengenai prioritas penggunaan keuntungan BUMDes untuk infrastruktur pertanian seperti jalan dan irigasi mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap alokasi sumber daya yang lebih berorientasi pada sektor produktif. Harapan agar BUMDes berkontribusi pada kegiatan sosial kemasyarakatan seperti peringatan hari besar dan program pemberdayaan perempuan menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap peran sosial-budaya BUMDes, tidak semata-mata fokus pada aspek ekonomi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pendung Hiang, Bapak Burhan, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Dalam perspektif agama, pengelolaan harta dan sumber daya ekonomi desa harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama, bukan hanya segelintir orang. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa seharusnya bisa mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan. Kontribusi BUMDes tidak hanya diukur dari berapa rupiah yang disetor ke kas desa, tapi juga dampak sosialnya. Saya mengapresiasi adanya program beasiswa, tapi perlu diperluas dengan program bantuan untuk lansia dan keluarga kurang mampu. BUMDes juga bisa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur ibadah dan pendidikan yang masih terbatas di desa kita." (Burhan, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 3 Maret 2025, Jam 16.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dalam perspektif religius, peran BUMDes dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan desa harus dilandasi prinsip keadilan dan pemerataan manfaat bagi seluruh warga. Pandangan bahwa kontribusi BUMDes tidak semata diukur secara finansial tetapi juga dampak sosialnya mencerminkan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif dan holistik. Apresiasi terhadap program beasiswa yang telah

berjalan disertai dengan usulan perluasan cakupan program bantuan sosial menunjukkan pengakuan atas upaya yang telah dilakukan sekaligus harapan untuk pengembangan lebih lanjut. Identifikasi infrastruktur ibadah dan pendidikan sebagai area potensial kontribusi BUMDes menunjukkan persepsi bahwa lembaga ekonomi desa juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan aspek spiritual dan intelektual masyarakat, tidak hanya fokus pada infrastruktur ekonomi.

Dari hasil observasi pada tanggal 17 Februari 2025, ditemukan bahwa kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa belum terlihat signifikan dalam bentuk infrastruktur atau fasilitas publik. Tidak ditemukan adanya papan informasi yang menjelaskan kontribusi BUMDes dalam pembangunan tertentu. Program beasiswa yang disebutkan dalam wawancara terverifikasi dengan adanya 8 siswa SD dan SMP yang menerima bantuan biaya pendidikan sebesar Rp100.000 per bulan dari dana sosial BUMDes. Dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 yang terpajang di kantor desa, terlihat bahwa kontribusi PADes dari BUMDes memang tercatat sebesar Rp12 juta dari total anggaran Rp1,2 miliar. Beberapa infrastruktur desa seperti jalan pertanian dan saluran irigasi masih dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan. Tidak terlihat adanya proyek pembangunan berkelanjutan yang didanai secara khusus dari kontribusi BUMDes.

Peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya inisiasi positif meski belum mencapai hasil yang optimal. Pada dimensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, BUMDes telah berhasil menciptakan lapangan kerja

langsung bagi 7 warga desa melalui tiga unit usaha yang dikelolanya. Sistem bagi hasil yang diterapkan mencerminkan adanya upaya membangun pola kemitraan yang lebih adil dengan pengelola unit usaha. Unit penyewaan alat pertanian memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya bagi petani, sementara unit simpan pinjam telah memfasilitasi akses permodalan bagi 25 keluarga dengan bunga yang lebih kompetitif dibandingkan praktik rentenir. Namun, skala dampak ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah 350 kepala keluarga di desa, dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 30%. Fenomena migrasi pemuda desa untuk mencari pekerjaan di luar daerah mengindikasikan belum terciptanya ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja produktif.

Dalam aspek pengembangan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes telah mengidentifikasi potensi unggulan berupa kopi dan tenun songket khas Jambi, serta peluang pengembangan agrowisata yang memanfaatkan keindahan lanskap pertanian desa. Inisiasi awal berupa pengadaan mesin pengolahan kopi dan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan mencerminkan langkah positif meskipun masih dalam tahap perencanaan. Adanya dukungan dari pemerintah desa berupa alokasi dana untuk penguatan kapasitas pengelola dan upaya menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Namun, implementasi rencana ini masih terkendala oleh keterbatasan modal, kapasitas SDM, dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam sektor ekonomi baru seperti pariwisata. Belum optimalnya penggunaan aset produktif seperti mesin pengolahan kopi dan rendahnya nilai tambah produk lokal

seperti kopi dan tenun songket yang masih dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah mencerminkan belum terwujudnya rantai nilai yang menguntungkan bagi produsen lokal.

Dari segi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan pembangunan, BUMDes telah menyetorkan Rp12 juta atau 25% dari keuntungannya ke kas desa sebagai PADes. Meskipun telah memiliki mekanisme formal dalam pengelolaan keuangan dengan alokasi khusus untuk pengembangan usaha dan dana sosial, kontribusi ini masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 1% dari total anggaran desa. Program bantuan sosial berupa beasiswa bagi 8 siswa kurang mampu menunjukkan adanya dimensi sosial dalam operasional BUMDes, namun cakupannya masih sangat terbatas. Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat luas menciptakan kesenjangan informasi dan persepsi bahwa kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa belum signifikan. Tidak adanya proyek pembangunan berkelanjutan yang didanai secara khusus dari kontribusi BUMDes semakin memperkuat persepsi tersebut.

Secara keseluruhan, peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih berada pada tahap perkembangan awal yang membutuhkan penguatan pada berbagai aspek. Keberadaan tiga unit usaha yang telah beroperasi dan rencana pengembangan usaha berbasis potensi lokal menunjukkan adanya dasar yang cukup baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih signifikan, diperlukan strategi pengembangan yang lebih komprehensif dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta kontribusi

yang lebih substansial terhadap pembangunan desa. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan modal, dan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pendung Hiang.

4.2 Pembahasan

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang

Pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari aspek tata kelola kelembagaan, BUMDes Desa Pendung Hiang telah memiliki struktur organisasi formal yang didukung dengan dokumen legalitas berupa AD/ART yang disahkan pada tahun 2022. Namun, implementasi struktur organisasi tersebut belum berjalan optimal dengan masih terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab di antara pengurus. Rapat koordinasi yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan fungsi manajemen, tetapi rendahnya tingkat kehadiran anggota mengindikasikan komitmen yang belum maksimal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan BUMDes juga sangat terbatas, ditandai dengan minimnya sosialisasi program dan kurangnya forum-forum dialog dengan warga desa. Dominasi perangkat desa dalam pengambilan keputusan tanpa pelibatan aktif masyarakat luas mengakibatkan program BUMDes kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang masih menjadi kendala signifikan. Mayoritas pengurus berlatar belakang pendidikan menengah dengan hanya direktur dan bendahara yang lulusan perguruan tinggi. Kesenjangan kompetensi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan analisis dan pengelolaan yang bersifat strategis. Program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan sangat minim, dengan pelatihan terakhir tentang kewirausahaan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar setahun lalu hanya diikuti oleh dua orang pengurus. Distribusi pengetahuan yang tidak merata menciptakan kesenjangan kapasitas internal di organisasi BUMDes. Fenomena pengurus yang memiliki pekerjaan utama lain mencerminkan belum adanya sistem insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan talenta yang fokus mengelola BUMDes. Dari pengamatan lapangan, tingkat kehadiran pengurus yang aktif di kantor hanya sekitar 40% dari total struktur yang ada, menunjukkan belum adanya komitmen penuh waktu dalam pengelolaan BUMDes.

Aspek manajemen keuangan dan aset BUMDes Desa Pendung Hiang juga menunjukkan kelemahan mendasar. Sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi sepenuhnya. BUMDes belum mengadopsi standar akuntansi yang baku, sehingga meningkatkan risiko ketidakakuratan data dan menghambat proses analisis keuangan yang komprehensif. Modal BUMDes berasal dari dana desa sebesar Rp50 juta pada tahun 2022 dengan tambahan Rp25 juta pada tahun 2023, namun belum ada diversifikasi sumber permodalan. Mekanisme pelaporan keuangan bersifat

internal kepada kepala desa tanpa publikasi luas kepada masyarakat, mencerminkan tingkat transparansi yang masih terbatas. Aset yang dimiliki BUMDes saat ini berupa satu unit kendaraan operasional dan peralatan pertanian untuk unit usaha sewa, yang relatif terbatas dan belum dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan maksimal. Tidak adanya mekanisme kontrol dan audit independen terhadap pengelolaan keuangan BUMDes juga meningkatkan risiko inefisiensi dan potensi penyalahgunaan. Lemahnya sistem administrasi transaksi seperti tidak konsistennya pemberian bukti pembayaran formal menunjukkan belum adanya standarisasi prosedur keuangan.

Pengelolaan BUMDes yang efektif merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan perannya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Anggraeni (2021) menjelaskan bahwa tata kelola kelembagaan BUMDes yang baik harus menerapkan prinsip partisipatif, akuntabilitas, dan transparansi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program BUMDes akan meningkatkan rasa kepemilikan dan mendukung keberlanjutan usaha. Senada dengan itu, Widiastuti dan Kurniasih (2023) menegaskan bahwa pola tata kelola BUMDes perlu dibangun secara kolaboratif dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pihak eksternal seperti lembaga pendamping dan pemerintah daerah.

Kapasitas sumber daya manusia pengelola menjadi determinan utama keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan.

Penelitian Pratiwi dan Mardiyono (2022) pada 12 BUMDes di Jawa Timur menunjukkan bahwa BUMDes yang berhasil mencapai kemandirian finansial dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat umumnya dipimpin oleh pengelola yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan pengalaman wirausaha. Pranoto dan Waluyo (2020) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas pengelola BUMDes tidak hanya terkait dengan peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga penguatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, mentoring oleh praktisi bisnis, serta studi banding ke BUMDes yang berhasil merupakan strategi efektif dalam membangun kapasitas pengelola.

Manajemen keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi bagi keberlanjutan operasional BUMDes. Sulistyowati dan Rahman (2020) dalam studi mereka terhadap BUMDes di Kabupaten Bantul menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi yang terstandarisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan BUMDes. Adopsi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan BUMDes. Sejalan dengan itu, penelitian Nugroho dan Hidayat (2021) menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sumber permodalan dan pengembangan strategi investasi yang cermat untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa dalam menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang masih menghadapi tantangan fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek tata kelola kelembagaan yang belum optimal mencerminkan ketidaksiapan institusional dalam menjalankan fungsi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Fenomena kesenjangan antara struktur formal dengan implementasi di lapangan menggambarkan adanya "institutional decoupling" yang dijelaskan oleh Hermawan et al. (2022) sebagai kondisi di mana organisasi memiliki struktur formal yang baik namun tidak berfungsi dalam praktiknya. Ini serupa dengan temuan Yulianto et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa banyak BUMDes di Indonesia masih terjebak dalam formalitas kelembagaan tanpa kapasitas operasional yang memadai.

Keterbatasan kapasitas SDM pengelola BUMDes Desa Pendung Hiang menjadi hambatan serius dalam mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha. Menurut Nurhayati dan Kusuma (2021), kompetensi pengelola BUMDes seharusnya mencakup kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan keterampilan teknis spesifik sesuai dengan unit usaha yang dikembangkan. Realitas di Desa Pendung Hiang di mana pengurus memiliki pekerjaan rangkap tanpa dedikasi penuh terhadap pengelolaan BUMDes sejalan dengan fenomena yang diidentifikasi oleh Pratama (2023) sebagai "part-time entrepreneurship syndrome" yang menghambat profesionalisme pengelolaan BUMDes. Solusi penguatan kapasitas melalui pendampingan intensif dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan Haryanto (2020) perlu diimplementasikan secara sistematis.

Lemahnya manajemen keuangan dan aset BUMDes Desa Pendung Hiang mencerminkan belum adanya orientasi profesional dalam pengelolaan bisnis. Penggunaan sistem pencatatan manual dan belum adanya standarisasi akuntansi sangat kontras dengan rekomendasi Widodo et al. (2021) tentang pentingnya digitalisasi administrasi keuangan BUMDes untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Minimnya transparansi kepada masyarakat juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang ditekankan oleh Hidayat dan Sulaksono (2020) sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap BUMDes. Modal yang hanya bersumber dari dana desa tanpa ada strategi pengembangan investasi menunjukkan belum adanya kemandirian finansial sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Rahmawati dan Susilowati (2022).

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang perlu diarahkan pada penguatan institusional yang komprehensif. Pembentukan tim pendamping yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh Mulyono (2023) dapat membantu mempercepat transformasi manajerial BUMDes. Pengembangan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dengan dukungan perguruan tinggi lokal juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. Adopsi sistem manajemen keuangan berbasis teknologi dan digitalisasi proses bisnis sebagaimana dijelaskan oleh Santoso dan Rahmawati (2021) perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Strategi pengembangan usaha yang berfokus pada potensi lokal berupa kopi dan tenun songket dengan pendekatan klaster industri seperti yang direkomendasikan

Purnomo dan Supadmi (2023) dapat menjadi arah pengembangan BUMDes yang lebih berkelanjutan dan berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pendung Hiang.

2. Potensi Ekonomi Di Desa Pendung Hiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Potensi ekonomi Desa Pendung Hiang menunjukkan beragam kekayaan sumber daya yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek potensi sumber daya alam dan pertanian, desa ini memiliki keunggulan berupa lahan produktif yang mencapai lebih dari setengah total wilayah desa dengan komoditas unggulan padi, kopi, dan kayu manis. Produktivitas padi mencapai 4,8 ton per hektar, menunjukkan tingkat kesuburan lahan yang cukup baik dibandingkan rata-rata nasional. Potensi pengembangan tanaman hortikultura dan inisiasi pertanian organik oleh kelompok petani muda menunjukkan adanya dinamika inovasi dalam sektor ini. Kekayaan alam berupa sumber mata air yang berlimpah di bagian utara desa dan kawasan hutan desa seluas 120 hektar yang ditumbuhi berbagai tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti durian, petai, dan jengkol, merupakan aset potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lanskap pertanian yang indah juga membuka peluang pengembangan agrowisata sebagai diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya nilai tambah produk pertanian akibat minimnya pengelolaan pasca panen dan terbatasnya akses pasar.

Dalam aspek potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Desa Pendung Hiang memiliki basis ekonomi kreatif yang cukup beragam dengan 15 unit usaha pengolahan makanan berbasis hasil pertanian, 7 pengrajin anyaman bambu dan rotan, serta 10 pengrajin tenun songket khas Jambi. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam kelompok bordir dan sulaman tradisional mencerminkan adanya potensi pemberdayaan ekonomi perempuan. Keunikan produk kerajinan dengan motif khas daerah menunjukkan adanya nilai budaya yang dapat menjadi nilai jual tersendiri. Namun, UMKM desa masih menghadapi kendala klasik berupa pemasaran yang masih terbatas pada pasar lokal, kemasan produk yang belum menarik, serta rendahnya literasi digital yang menghambat akses ke pasar yang lebih luas. Infrastruktur produksi yang masih sederhana dan belum memenuhi standar, seperti pada unit pengolahan makanan yang belum memiliki sertifikasi PIRT, juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan daya saing produk. Tidak adanya sentra UMKM atau koperasi yang dapat menjadi wadah kolektif mencerminkan masih lemahnya ekosistem pendukung usaha mikro di desa.

Dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas ekonomi, Desa Pendung Hiang masih menghadapi keterbatasan mendasar yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi yang ada. Meskipun jalan utama desa sepanjang 3 km sudah beraspal, namun lebih dari setengah jalan desa masih berupa jalan tanah dan kerikil, dengan akses ke lahan pertanian umumnya berupa jalan setapak yang sulit dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transportasi dan kerusakan produk pertanian terutama pada musim hujan. Jaringan listrik telah

menjangkau mayoritas rumah warga, namun akses digital masih terbatas dengan sinyal telepon seluler yang lemah di beberapa dusun dan internet yang hanya tersedia di sekitar balai desa. Ketiadaan pasar desa menjadi kendala signifikan dalam sistem distribusi produk lokal, dengan jarak 7 km ke pasar kecamatan yang dapat meningkatkan biaya pemasaran. Kesenjangan informasi pasar ditandai dengan dominasi tengkulak dalam menentukan harga, sementara akses terhadap layanan perbankan juga terbatas dengan bank terdekat berjarak 15 km. Terbatasnya fasilitas pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat juga menjadi hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia produktif.

Potensi ekonomi desa merupakan keseluruhan kapasitas produktif yang tersedia di wilayah pedesaan dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurniawan (2020) menyatakan bahwa identifikasi dan pengembangan potensi ekonomi desa perlu didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan. Menurutnya, pengembangan potensi berbasis kearifan lokal tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas dan ketahanan sosial-budaya masyarakat desa. Sejalan dengan itu, Arifin dan Saputri (2022) menjelaskan bahwa potensi ekonomi desa akan optimal jika dikembangkan melalui pendekatan terintegrasi yang menghubungkan aspek hulu-hilir dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dalam kerangka kolaborasi pentahelix.

Sumber daya alam dan pertanian sebagai basis ekonomi desa memerlukan pendekatan inovatif untuk menghasilkan nilai tambah yang optimal. Penelitian Wulandari et al. (2021) pada 34 desa di Jawa Timur menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil mentransformasi produk pertanian primer menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi rata-rata mengalami peningkatan pendapatan masyarakat hingga 40 persen dibandingkan desa yang menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah. Studi tersebut menekankan pentingnya pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah di pedesaan yang didukung dengan transfer teknologi tepat guna dan penguatan kelembagaan petani. Sementara itu, Prasetyo dan Cahyono (2023) menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekonomi pedesaan melalui pengembangan sektor non-pertanian seperti pariwisata berbasis alam dan budaya, yang terbukti mampu menciptakan multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga di daerah yang minim sumber daya lahan.

Penguatan UMKM dan perbaikan infrastruktur ekonomi menjadi faktor determinan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Penelitian longitudinal Rahmawati dan Hidayat (2020) pada 15 desa di Sulawesi Selatan menemukan bahwa desa-desa yang berhasil mengembangkan klaster industri kreatif berbasis potensi lokal mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik saat menghadapi guncangan eksternal, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Klasterisasi memungkinkan alih pengetahuan, berbagi sumber daya, dan penguatan rantai nilai yang memberikan manfaat kolektif bagi pelaku usaha. Sejalan dengan itu, Nugroho et al. (2022) dalam studi mereka terhadap 50 desa di

Jawa Tengah mengidentifikasi bahwa kesenjangan digital dan minimnya infrastruktur pendukung ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat desa dalam memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi. Mereka merekomendasikan pendekatan gradual dalam transformasi digital pedesaan, dimulai dari penguatan literasi digital, pengembangan infrastruktur dasar, hingga integrasi UMKM dalam ekosistem digital.

Potensi ekonomi Desa Pendung Hiang memiliki karakteristik yang kompleks dengan kekayaan sumber daya alam dan modal sosial-budaya yang belum teroptimalkan. Fenomena yang teridentifikasi di desa ini mencerminkan apa yang disebut Priyono dan Wirathi (2021) sebagai "paradoks kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya" (paradox of poverty amidst resource abundance), di mana melimpahnya potensi ekonomi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini didukung oleh temuan Darmawan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia masih terjebak dalam pola ekonomi subsisten tanpa kemampuan menciptakan nilai tambah yang signifikan dari sumber daya yang dimiliki.

Pengembangan potensi pertanian di Desa Pendung Hiang perlu diarahkan pada strategi peningkatan nilai tambah melalui pendekatan agropreneurship sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Haryanto (2022). Ekspansi budidaya kopi arabika dan robusta yang telah ada di lahan seluas 15 hektar dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi berbasis komoditas bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan studi Mardiana dan Supriyadi (2023) yang mengidentifikasi bahwa desa-desa penghasil kopi spesialti mampu menciptakan rantai nilai yang lebih

menguntungkan petani melalui sistem perdagangan langsung (direct trade) dengan konsumen atau roastery. Pengembangan agrowisata berbasis kebun kopi dan persawahan sebagaimana direkomendasikan Santoso et al. (2021) juga dapat menjadi strategi diversifikasi ekonomi yang menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat desa.

Potensi ekonomi kreatif berbasis tenun songket dan kerajinan anyaman perlu dikembangkan melalui pendekatan revitalisasi kearifan lokal yang terintegrasi dengan teknologi digital. Menurut Widodo dan Hastuti (2021), produk kerajinan tradisional dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar global melalui inovasi desain, standarisasi kualitas, dan strategi branding yang kuat. Tantangan pemasaran digital yang dihadapi UMKM Desa Pendung Hiang mencerminkan fenomena yang disebut Nugraha dan Wahyudi (2023) sebagai "kesenjangan literasi digital geografis" (geographical digital literacy gap) yang memerlukan intervensi sistematis melalui program pendampingan dan pengembangan kapasitas. Pembentukan klaster industri kreatif sebagaimana direkomendasikan Sutrisno dan Haryati (2023) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan skala ekonomi yang dihadapi pengrajin individual.

Transformasi potensi ekonomi Desa Pendung Hiang menjadi kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Pengembangan model ekonomi sirkular pedesaan (rural circular economy) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Wijaya dan Ramadhan (2022) dapat menjadi kerangka konseptual dalam memaksimalkan nilai ekonomi dari sumber daya yang tersedia dengan dampak lingkungan minimal. Integrasi antara sektor

pertanian, UMKM, dan pariwisata dalam satu ekosistem ekonomi desa yang saling mendukung berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Namun, sebagaimana ditekankan oleh Permatasari dan Hasan (2020), transformasi ini memerlukan penguatan modal sosial dan kelembagaan desa sebagai prasyarat bagi keberlanjutan inisiatif ekonomi desa.

Berdasarkan analisis terhadap potensi ekonomi Desa Pendung Hiang, diperlukan strategi pengembangan yang fokus pada tiga pilar utama. Pertama, modernisasi pertanian berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan produktivitas, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan kayu manis. Kedua, penguatan ekosistem UMKM melalui pengembangan sentra usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan fasilitasi akses pasar, modal, dan teknologi. Ketiga, perbaikan infrastruktur pendukung ekonomi terutama akses jalan pertanian, pasar desa, dan infrastruktur digital untuk mengatasi kesenjangan aksesibilitas yang menghambat pengembangan ekonomi. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, potensi ekonomi Desa Pendung Hiang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya inisiasi awal yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Dalam dimensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, BUMDes telah berkontribusi menciptakan lapangan kerja langsung bagi 7 warga desa melalui tiga unit usaha yang dikelolanya, yaitu penyewaan alat pertanian, penggilingan

padi, dan simpan pinjam. Sistem bagi hasil yang diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk membangun pola kemitraan yang lebih adil dengan pengelola unit usaha. Unit penyewaan alat pertanian tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi operator tetapi juga memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya bagi petani lokal. Unit penggilingan padi juga telah menyerap 3 tenaga kerja dengan pendapatan bulanan yang relatif stabil. Unit simpan pinjam yang baru berjalan setahun telah memfasilitasi akses permodalan bagi 25 keluarga dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan praktik rentenir, sehingga berpotensi mendorong pengembangan ekonomi mikro. Namun, dampak penciptaan lapangan kerja ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah 350 kepala keluarga di desa, dengan angka kemiskinan yang masih mencapai sekitar sepertiga dari total penduduk. Fenomena migrasi pemuda desa untuk mencari pekerjaan di luar daerah mengindikasikan belum terciptanya ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja produktif secara optimal.

Dalam aspek pengembangan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes Desa Pendung Hiang telah mengidentifikasi beberapa potensi unggulan yang dapat dikembangkan, terutama kopi dan tenun songket khas Jambi, serta peluang agrowisata yang memanfaatkan keindahan lanskap pertanian desa. Upaya awal berupa pengadaan mesin sangrai kopi berkapasitas 5 kg dan beberapa peralatan seduh kopi menunjukkan adanya inisiasi untuk mengembangkan unit usaha pengolahan kopi, meskipun peralatan tersebut belum dioperasikan secara optimal. Rencana menjadi agregator produk tenun songket dengan menampung hasil produksi dari 10 pengrajin lokal juga menunjukkan pemahaman tentang peran

strategis BUMDes dalam menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih luas. Pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa pengiriman dua orang pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan pengolahan kopi di Kabupaten Kerinci. Namun, implementasi rencana pengembangan usaha ini masih terkendala oleh keterbatasan modal dan kapasitas SDM. Potensi agrowisata yang diidentifikasi oleh kepala desa, dengan rencana pengembangan homestay sederhana dan paket wisata petik kopi, masih dalam tahap perencanaan dengan tantangan berupa kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam sektor ekonomi baru.

Dari segi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pembangunan, BUMDes Desa Pendung Hiang telah memberikan setoran kepada kas desa sebesar Rp12 juta atau seperempat dari total keuntungan yang diperoleh pada tahun 2024. Nilai ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran desa yang mencapai Rp1,2 miliar per tahun. Alokasi keuntungan lainnya didistribusikan untuk pengembangan usaha 40%, cadangan modal 20%, dan dana sosial 15% yang digunakan untuk program beasiswa bagi 8 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Meskipun telah memiliki mekanisme formal dalam pengelolaan keuangan yang diatur dalam AD/ART, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat luas masih belum optimal, dengan pelaporan yang bersifat internal kepada kepala desa tanpa publikasi luas. Tidak adanya proyek pembangunan berkelanjutan yang didanai secara khusus dari kontribusi BUMDes mencerminkan masih terbatasnya peran lembaga ini dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di desa. Masyarakat mengharapkan kontribusi BUMDes untuk perbaikan infrastruktur pertanian

seperti jalan dan irigasi, serta program pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial-budaya, namun harapan ini belum terpenuhi secara signifikan.

Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan manifestasi dari konsep pembangunan ekonomi berbasis komunitas (community-based economic development) yang menekankan pada pemberdayaan potensi lokal. Hidayat dan Sulastri (2020) mengidentifikasi tiga peran strategis BUMDes, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian desa (economic driving force), sebagai lembaga sosial (social institution), dan sebagai entitas bisnis milik desa (village business entity). Ketiga peran ini harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai motor penggerak ekonomi, BUMDes berperan dalam menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi pengembangan usaha, dan membangun keterkaitan ekonomi antar pelaku usaha di desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berfungsi dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Sebagai entitas bisnis, BUMDes harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang dapat berkontribusi pada pendapatan desa dan pembiayaan pembangunan.

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui BUMDes memerlukan pendekatan strategis yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Penelitian Anggraeni et al. (2022) terhadap 30 BUMDes di Jawa Timur menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes yang berhasil menciptakan dampak signifikan terhadap kesejahteraan umumnya memenuhi tiga kriteria: (1) berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal, (2) melibatkan masyarakat dalam rantai nilai,

dan (3) memiliki model bisnis yang berkelanjutan. BUMDes yang hanya menjalankan bisnis konvensional seperti simpan pinjam tanpa inovasi cenderung memiliki dampak terbatas dalam penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Prabowo (2021) menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa yang didukung oleh BUMDes sebagai strategi untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru. Model bisnis kolaboratif (*collaborative business model*) antara BUMDes dengan UMKM, koperasi, dan entitas bisnis lainnya dapat memperluas dampak ekonomi dan memperkuat daya ungkit pemberdayaan masyarakat desa.

Kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa tidak hanya diukur dari setoran ke kas desa, tetapi juga dari dampak komprehensif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Studi longitudinal Wijaya dan Nurjanah (2023) pada 25 desa di 5 provinsi mengungkapkan bahwa keberlanjutan BUMDes sangat dipengaruhi oleh model tata kelola yang diterapkan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. BUMDes yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dalam pelaporan keuangan dan pembagian hasil usaha, cenderung memperoleh dukungan lebih luas dari masyarakat dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Rahmawati et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif dalam pengelolaan BUMDes dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, baik sebagai pengelola maupun penerima manfaat. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memperluas dampak ekonomi BUMDes tetapi juga memperkuat legitimasi

sosialnya sebagai lembaga ekonomi yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

Peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih berada pada tahap perkembangan awal yang memerlukan penguatan secara komprehensif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ramadana (2022) yang mengidentifikasi bahwa mayoritas BUMDes di Indonesia masih menghadapi "triple challenges" berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya kompetensi manajerial pengelola, dan terbatasnya akses terhadap permodalan dan pasar. BUMDes Desa Pendung Hiang telah memiliki tiga unit usaha operasional, namun skala dan dampaknya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Saputra dan Winarno (2021) sebagai "underutilized institution" atau lembaga yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

Dalam aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, BUMDes Desa Pendung Hiang perlu mengembangkan strategi diversifikasi usaha yang lebih berorientasi pada nilai tambah. Keterbatasan penyerapan tenaga kerja yang hanya mencakup 7 orang dari 350 kepala keluarga di desa mencerminkan belum optimalnya peran BUMDes sebagai "employment generator" sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hidayati (2021). Pengembangan unit usaha berbasis pengolahan hasil pertanian, seperti kopi yang telah diidentifikasi sebagai komoditas unggulan desa, berpotensi menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Model "farmer-preneur" yang

diperkenalkan oleh Sulistyowati dan Haryanto (2022) dapat menjadi kerangka konseptual dalam mentransformasi petani subsisten menjadi wirausaha berbasis pertanian dengan dukungan inkubasi dari BUMDes.

Pengembangan usaha berbasis potensi lokal memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pasar. Rencana BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan kopi dan menjadi agregator produk tenun songket menunjukkan visi yang tepat, namun perlu didukung dengan strategi operasional yang lebih konkret. Menurut Widodo dan Permatasari (2023), pengembangan produk lokal bernilai tinggi memerlukan integrasi antara pelestarian kearifan lokal (local wisdom preservation) dengan inovasi dan adaptasi pasar (market adaptation). BUMDes dapat memainkan peran sebagai "innovation broker" yang menghubungkan pengetahuan tradisional masyarakat dengan teknologi dan tren pasar terkini. Pengembangan agrowisata yang direncanakan juga perlu memerhatikan konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) sebagaimana direkomendasikan oleh Pratiwi dan Nurhayati (2023), dengan memastikan pelestarian lingkungan dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa dan pembangunan, BUMDes Desa Pendung Hiang perlu mengembangkan model bisnis yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Setoran ke kas desa yang masih minimal mencerminkan belum optimalnya fungsi BUMDes sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial, sebagaimana direkomendasikan Nugraha dan Sayekti (2021), menjadi prasyarat bagi peningkatan kinerja keuangan BUMDes.

Pendekatan "social entrepreneurship" yang mengintegrasikan tujuan sosial dengan keberlanjutan finansial, sebagaimana dikembangkan oleh Wibowo dan Nugroho (2022), dapat menjadi model pengembangan BUMDes yang menyeimbangkan peran bisnis dan sosialnya. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berkontribusi pada PADes tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas melalui program-program sosial dan pemberdayaan yang didanai dari keuntungan usaha.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan BUMDes Desa Pendung Hiang menunjukkan beberapa kelemahan mendasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi tata kelola kelembagaan, meskipun telah memiliki struktur organisasi formal dan AD/ART yang disahkan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih tugas dan rendahnya tingkat partisipasi pengurus dalam rapat koordinasi. Kapasitas sumber daya manusia pengelola masih terbatas dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan menengah dan minimnya program peningkatan kompetensi. Fenomena pengurus yang memiliki pekerjaan rangkap menunjukkan belum adanya sistem insentif yang memadai. Dalam hal manajemen keuangan dan aset, pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa mengadopsi standar akuntansi yang baku, sementara transparansi pengelolaan keuangan terbatas pada pelaporan internal kepada kepala desa tanpa publikasi luas kepada masyarakat. Aset yang dimiliki BUMDes masih relatif terbatas dan belum dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan maksimal.

2. Potensi Ekonomi di Desa Pendung Hiang

Desa Pendung Hiang memiliki potensi ekonomi yang beragam namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dari segi sumber daya alam dan pertanian, desa ini memiliki lahan produktif mencapai 65% dari total wilayah dengan komoditas unggulan padi, kopi, dan kayu manis. Keberadaan sumber mata air

yang berlimpah dan kawasan hutan desa seluas 120 hektar merupakan aset alamiah yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan agrowisata. Dalam aspek UMKM, terdapat keragaman usaha berbasis kearifan lokal dengan 15 unit usaha pengolahan makanan, 7 pengrajin anyaman, dan 10 pengrajin tenun songket, namun masih terkendala pemasaran dan kemasan produk yang belum menarik. Infrastruktur ekonomi masih terbatas dengan 60% jalan desa masih berupa tanah dan kerikil, ketiadaan pasar desa, dan akses digital yang belum merata, sehingga menghambat distribusi produk dan akses terhadap informasi pasar.

3. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peran BUMDes Desa Pendung Hiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal. Dalam penciptaan lapangan kerja, BUMDes hanya mampu menyerap 7 tenaga kerja dari 350 kepala keluarga di desa, dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 30%. Unit simpan pinjam telah memfasilitasi akses permodalan bagi 25 keluarga, namun dampaknya masih terbatas. Untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes telah mengidentifikasi komoditas unggulan berupa kopi dan tenun songket, serta peluang agrowisata, namun masih dalam tahap perencanaan dengan kendala modal dan kapasitas SDM. Dari segi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, BUMDes menyetorkan Rp12 juta atau hanya sekitar 1% dari total anggaran desa, dengan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi 8 siswa yang cakupannya masih sangat terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pendung Hiang, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

1. Pertama, untuk memperbaiki pengelolaan BUMDes, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dengan pembagian tugas yang lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Sistem rekrutmen pengurus harus lebih selektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan komitmen waktu. Program pengembangan kapasitas SDM pengelola harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan manajerial, teknis, dan kewirausahaan yang didukung oleh alokasi dana desa dan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan. Sistem manajemen keuangan harus ditingkatkan dengan mengadopsi standar akuntansi yang baku dan penerapan teknologi informasi untuk pencatatan transaksi, serta publikasi laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Kedua, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, BUMDes perlu mengembangkan unit usaha pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan seperti kopi dan hasil hutan non-kayu. Pembentukan klaster industri kreatif yang mengintegrasikan pengrajin tenun songket dan anyaman bambu dapat memperkuat daya saing produk melalui standardisasi kualitas, desain kemasan yang menarik, dan strategi pemasaran kolektif. Perbaikan infrastruktur pendukung ekonomi terutama jalan pertanian dan sistem irigasi harus menjadi prioritas dengan pendanaan kolaboratif

antara dana desa, BUMDes, dan program pemerintah. Pengembangan pasar desa yang terintegrasi dengan pusat informasi harga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani.

3. Ketiga, untuk meningkatkan peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat, diversifikasi unit usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja harus dilakukan, terutama yang berbasis pengolahan hasil pertanian dan pariwisata desa. Penguatan unit simpan pinjam dengan peningkatan modal dan sistem pengelolaan yang lebih profesional dapat memperluas akses masyarakat terhadap permodalan usaha. Implementasi rencana pengembangan agrowisata harus dipercepat dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembagian manfaat. Peningkatan kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa dapat dicapai melalui optimalisasi aset desa yang belum produktif dan pengembangan unit usaha baru yang inovatif. Program tanggung jawab sosial BUMDes juga perlu diperluas untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kelompok rentan dengan sistem penyaluran yang lebih transparan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, R. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 14(3), 56-72.
- Arikunko, S. (2017). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Gung Persada.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asyari, A. (2020). *BUMDES sebagai Wadah Pemberdayaan Ekonomi di Pedesaan*. Yogyakarta: Penerbit Media Abadi.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Firmansyah, A., Prasetyo, B., & Wahyudi, D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 45-62.
- Harun, M., & Pratama, R. (2022). Aksesibilitas Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(1), 15-30.
- Hidayat, R. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui BUMDES: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Hidayat, R., Susilo, A., & Widiastuti, T. (2022). Potensi Ekonomi Desa dan Strategi Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(3), 112-128.
- Hidayat, R., Wahyuni, S., & Supriyono, B. (2022). Implementasi Peran Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 45-62. ISSN 2540-8113.
- Hidayatullah, S., Rahman, A., & Kurniawan, B. (2022). Peran BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 15(2), 78-95.

- Iqbal, M., Suharti, R., & Purwanti, E. (2021). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Peran Wilayah*, 14(1), 23-40. ISSN 2087-4502.
- Izzuddin, H. (2020). *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawati, D., Pratama, A., & Setiawan, B. (2021). Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja BUMDes. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(4), 201-215.
- Lestari, F., & Salim, A. (2020). Implementasi prinsip ekonomi syariah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 88-102. <https://doi.org/10.1234/jesi.2020.14102>
- Margono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maryam, S., Huda, N., & Zubaidi, A. (2022). Peran Potensi Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanganyar. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 78-95. ISSN 2548-4788.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, F. (2023). *Peran Ekonomi Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 45-59.
- Mulyadi, F. (2023). *Peran Ekonomi Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 45-59.
- Nasution, F. (2019). *Ekonomi Syariah dalam Praktik: Prinsip-Prinsip Ekonomi yang Berkeadilan*. Bandung: Pustaka Pelajar.

- Nasution, I., & Ramli, H. (2022). Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 42-57.
- Nugroho, D. (2022). *Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa: Teori dan Praktik dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Nugroho, D. (2022). *Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa: Teori dan Praktik dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. (2014). Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratama, R., & Susilo, A. (2021). Model Peran BUMDes di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 89-105.
- Rahmat, M. (2023). *Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan BUMDES*. Bandung: Pustaka Syariah.
- Riduwan. (2016). *Belajar Mudah Penelitian (Untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rina, M. (2021). Efektivitas penggunaan prinsip ekonomi syariah dalam pembiayaan BUMDES. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 9(3), 231-240. <https://doi.org/10.5678/jpe.2021.09123>
- Risal. (2022). POTENSI PASAR TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO). *Jurnal Ekonomi*, 3(223–254), 156–167.
- Rusydi, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Daerah: Strategi dan Implementasi*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin Press.
- Saifuddin, A. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, R. (2021). *Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Lokal*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 8(2), 87-101.
- Sari, I. (2021). Pengelolaan BUMDES berbasis ekonomi syariah di Desa Sukamulya. *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 7(2), 118-130. <https://doi.org/10.2345/jem.2021.07207>

- Sudarno, S. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Desa: Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa Mandiri*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, E. (2022). *Manajemen Kelembagaan Desa: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumodiningrat, G. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suprpto, T., & Prabowo, D. (2019). Pemberdayaan ekonomi Melalui BUMDES berbasis ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 22(1), 74-85. <https://doi.org/10.7890/jepd.2019.220105>
- Syamsuddin, A. (2022). *BUMDES: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufik, M., & Anwar, F. (2023). Evaluasi Pengelolaan BUMDes di Desa Terpencil: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 19(1), 76-92. <https://doi.org/10.1016/j.jpe.2023.01.007>
- Todaro, M. P. (2020). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Pemerintah Republik Indonesia.
- Utami, D., & Santoso, A. (2022). Peran Potensi Ekonomi Melalui BUMDes: Studi Kasus di Desa Sukorejo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 17(2), 45-58. <https://doi.org/10.1016/j.jed.2022.03.004>
- Widjaja, H. (2021). *Otonomi Desa: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Widodo, W. (2021). *Ekonomi Pembangunan Desa: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan.
- Widodo, W. (2021). *Ekonomi Pembangunan Desa: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan.

- Wiranta, S., Priyanto, H., & Yulianti, E. (2022). Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa dan Aksesibilitas Modal. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 17(3), 156-172.
- Yunus, M. (2020). *Kemandirian Ekonomi Desa: Perspektif dan Implementasi Pembangunan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2021). Tata kelola BUMDes dalam perspektif penguatan ekonomi desa: Studi di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 59-74.
- Haryanto, T. (2020). Penguatan kapasitas pengelola BUMDes: Model pendampingan berbasis kompetensi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 112-127.
- Hermawan, R., Wulandari, D., & Fahmi, I. (2022). Institutional decoupling dalam pengelolaan BUMDes: Analisis perbandingan kasus di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 45-62.
- Hidayat, S., & Sulaksono, T. (2020). Akuntabilitas dan transparansi BUMDes sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 189-204.
- Mulyono, S. (2023). Model pendampingan kolaboratif dalam penguatan kelembagaan BUMDes di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 8(1), 29-44.
- Nugroho, A. W., & Hidayat, M. (2021). Strategi optimalisasi aset desa melalui BUMDes: Pendekatan entrepreneurial village. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 195-210.
- Nurhayati, E., & Kusuma, I. C. (2021). Analisis kompetensi pengelola BUMDes dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 42-57.
- Pranoto, A. R., & Waluyo, D. (2020). Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes sebagai upaya penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 143-158.

- Pratama, S. (2023). Part-time entrepreneurship syndrome: Tantangan profesionalisme pengelolaan BUMDes di Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan*, 8(1), 78-94.
- Pratiwi, D. A., & Mardiyono, A. (2022). Faktor-faktor keberhasilan BUMDes dalam mencapai kemandirian finansial: Studi kasus 12 BUMDes di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(1), 89-105.
- Purnomo, A., & Supadmi, N. L. (2023). Pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal melalui BUMDes: Studi kasus di Provinsi NTB. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Regional*, 10(1), 56-71.
- Rahmawati, D., & Susilowati, N. (2022). Kemandirian finansial BUMDes: Konsep dan implementasi. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 112-127.
- Santoso, B., & Rahmawati, Y. (2021). Digitalisasi proses bisnis BUMDes: Studi implementasi di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen*, 6(1), 67-82.
- Sulistyowati, E., & Rahman, A. (2020). Penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi pada BUMDes di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 96-112.
- Widiastuti, H., & Kurniasih, D. (2023). Tata kelola kolaboratif BUMDes dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. *Jurnal Governansi*, 9(1), 123-138.
- Widodo, T., Nugroho, S. B., & Handayani, W. (2021). Digitalisasi administrasi keuangan BUMDes: Peluang dan tantangan implementasi. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen*, 9(2), 156-171.

Lampiran 1

Kisi-Kisi dan Pedoman Wawancara: Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang

| No | Kisi-Kisi Pedoman Wawancara | Indikator | Rumusan Masalah | Pertanyaan Penelitian | Informan | Jawaban Mentah | Reduksi Data |
|----|------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|--|---|
| 1 | Struktur Organisasi BUMDes | Tata Kelola Kelembagaan | 1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang? | 1. Bagaimana struktur organisasi dan tata kelola BUMDes Desa Pendung Hiang? | Pengelola BUMDes (Budi) | "BUMDes Pendung Hiang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Penasehat, Direktur, Manager, dan staf operasional. Kami menjalankan rapat evaluasi setiap bulan untuk memantau kinerja semua unit usaha. Sistem pengambilan keputusan melibatkan dewan komisaris yang terdiri dari perwakilan masyarakat." | Reduksi: BUMDes memiliki struktur organisasi lengkap dengan sistem evaluasi bulanan dan pengambilan keputusan partisipatif. Display: Struktur: Penasehat-Direktur-Manager-Staf; Evaluasi rutin bulanan. Kesimpulan: Tata kelola BUMDes terstruktur dan partisipatif. |
| 2 | Proses Pengambilan Keputusan | Tata Kelola Kelembagaan | 1. | 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam BUMDes? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Keputusan strategis BUMDes selalu melalui musyawarah desa dan melibatkan BPD. Setiap proposal usaha baru harus mendapat persetujuan dari desa dan | Reduksi: Keputusan melalui musyawarah desa dan melibatkan BPD dengan sosialisasi masyarakat. Display: Proses: Musyawarah |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|----|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan." | h Desa → BPD → Sosialisasi Masyarakat. Kesimpulan: Pengambilan keputusan transparan dan demokratis. |
| 3 | Transparansi dan Akuntabilitas | Tata Kelola Kelembagaan | 1. | 3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes? | Tokoh Masyarakat (Bapak Firmanudin) | "BUMDes Pendung Hiang rutin melaporkan keuangan setiap triwulan dalam rapat desa. Ada papan pengumuman khusus yang menampilkan laporan keuangan sederhana. Namun masih perlu peningkatan dalam penyajian informasi yang lebih detail dan mudah dipahami masyarakat." | Reduksi: Pelaporan keuangan triwulan rutin namun perlu peningkatan detail informasi. Display: Laporan triwulan di rapat desa; Papan pengumuman; Perlu peningkatan detail. Kesimpulan: Transparansi ada namun perlu ditingkatkan. |
| 4 | Sistem Pengawasan Internal | Tata Kelola Kelembagaan | 1. | 4. Bagaimana sistem pengawasan internal yang diterapkan BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Kami memiliki tim pengawas internal yang bertugas mengecek operasional harian dan bulanan. Ada buku catatan harian untuk setiap unit usaha. Setiap bulan dilakukan audit internal | Reduksi: Tim pengawas internal dengan audit bulanan dan dokumentasi harian. Display: Tim pengawas → Cek harian/bula |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------|--|---|
| | | | | | | <p>sederhana untuk memastikan tidak ada penyimpangan."</p> | <p>nan → Audit internal. Kesimpulan: Sistem pengawasan internal berjalan rutin dan terdokumentasi.</p> |
| 5 | <p>Koordinasi dengan Pemerintah Desa</p> | <p>Tata Kelola Kelembagaan</p> | <p>1.</p> | <p>5. Bagaimana koordinasi antara BUMDes dengan pemerintah desa?</p> | <p>Pengelola BUMDes (Budi)</p> | <p>"Koordinasi dengan pemerintah desa berjalan sangat baik. Kepala desa rutin menghadiri rapat bulanan BUMDes. Kami juga berkoordinasi dalam perencanaan APBDes untuk alokasi dana hibah atau bantuan untuk BUMDes."</p> | <p>Reduksi: Koordinasi baik dengan kehadiran kepala desa di rapat dan kerjasama APBDes. Display: Kepala desa hadir rapat bulanan; Koordinasi APBDes. Kesimpulan: Koordinasi dengan pemdes sangat kooperatif.</p> |
| 6 | <p>Kompetensi SDM Pengelola</p> | <p>Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> | <p>1.</p> | <p>1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pengelola BUMDes?</p> | <p>Pengelola BUMDes (Budi)</p> | <p>"Tim pengelola BUMDes sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA. Namun masih kurang dalam hal keterampilan manajemen keuangan dan pemasaran digital. Kami membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan</p> | <p>Reduksi: Pendidikan minimal SMA namun kurang keterampilan manajemen keuangan dan digital marketing. Display: Pendidikan: SMA+; Kurang: Manajemen keuangan &</p> |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|----|--|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | kapasitas." | pemasaran digital. Kesimpulan: SDM perlu peningkatan kapasitas di bidang spesifik. |
| 7 | Program Pelatihan dan Pengembangan | Kapasitas Sumber Daya Manusia | 1. | 2. Apa saja program pelatihan yang telah diikuti pengelola BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Tahun lalu kami mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi tentang manajemen BUMDes. Ada juga pelatihan kewirausahaan dari LSM setempat. Namun frekuensinya masih jarang, mungkin hanya 2-3 kali setahun." | Reduksi: Pelatihan dari Dinas Koperasi dan LSM dengan frekuensi 2-3 kali per tahun. Display: Sumber: Dinas Koperasi & LSM; Frekuensi: 2-3x/tahun. Kesimpulan: Pelatihan ada namun frekuensi masih terbatas. |
| 8 | Sistem Rekrutmen dan Seleksi | Kapasitas Sumber Daya Manusia | 1. | 3. Bagaimana sistem rekrutmen dan seleksi anggota BUMDes? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Rekrutmen anggota BUMDes melalui pengumuman terbuka di desa. Seleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan komitmen terhadap desa. Prioritas diberikan kepada warga asli desa yang memiliki keterampilan usaha." | Reduksi: Rekrutmen terbuka dengan seleksi berdasarkan kompetensi dan komitmen, prioritas warga asli. Display: Pengumuman terbuka → Seleksi kompetensi → Prioritas warga asli. Kesimpulan: |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|----|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | n: Sistem rekrutmen transparan dengan prioritas pemberdayaan lokal. |
| 9 | Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab | Kapasitas Sumber Daya Manusia | 1. | 4. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Setiap anggota memiliki job description yang jelas. Saya bertanggung jawab mengelola unit usaha simpan pinjam, ada yang mengelola toko sembako, dan ada yang fokus ke pertanian. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing." | Reduksi: Job description jelas dengan pembagian berdasarkan kemampuan : simpan pinjam, toko, pertanian. Display: Job description jelas; Pembagian: Simpan pinjam, Toko, Pertanian. Kesimpulan: Pembagian tugas jelas sesuai kompetensi masing-masing. |
| 10 | Motivasi dan Kinerja SDM | Kapasitas Sumber Daya Manusia | 1. | 5. Bagaimana motivasi dan penilaian kinerja SDM BUMDes? | Pengelola BUMDes (Budi) | "Kami memberikan insentif berdasarkan kinerja setiap kuartal. Ada penilaian kinerja sederhana berdasarkan target yang dicapai. Motivasi terbesar tim adalah keinginan | Reduksi: Insentif berdasarkan kinerja kuartalan dengan motivasi utama memajukan desa. Display: Insentif kuartalan; Motivasi: |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|----|---|----------------------------|--|---|
| | | | | | | memajukan desa, meskipun kompensasi finansial masih minimal." | memajukan desa; Kompensasi minimal. Kesimpulan: Motivasi intrinsik tinggi meski kompensasi terbatas. |
| 11 | Sistem Pencatatan Keuangan | Manajemen Keuangan dan Aset | 1. | 1. Bagaimana sistem pencatatan keuangan dalam BUMDes? | Pengelola BUMDes (Budi) | "Kami menggunakan sistem pencatatan manual dengan buku kas harian dan bulanan. Belum menggunakan software akuntansi khusus. Semua transaksi dicatat dengan bukti yang lengkap. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan triwulan." | Reduksi: Pencatatan manual dengan buku kas dan bukti transaksi lengkap, laporan bulanan/triwulan. Display: Manual: buku kas harian/bulanan; Belum software; Bukti lengkap. Kesimpulan: Pencatatan rapi namun masih manual, perlu digitalisasi. |
| 12 | Pengelolaan Modal dan Investasi | Manajemen Keuangan dan Aset | 1. | 2. Bagaimana pengelolaan modal awal dan rencana investasi BUMDes? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Modal awal BUMDes sebesar 50 juta dari APBDes dan hibah provinsi 25 juta. Investasi difokuskan ke unit usaha yang cepat menghasilkan: toko sembako, | Reduksi: Modal awal 75 juta (APBDes 50 juta + hibah 25 juta), fokus investasi unit usaha cepat profit. Display: Modal: 75 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------|----|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | | | simpan pinjam, dan penggilingan padi. Rencana ke depan akan mengembangkan wisata lokal." | juta (APBDes+hibah); Investasi: toko, simpan pinjam, penggilingan. Kesimpulan: Modal cukup dengan strategi investasi konservatif namun menguntungkan. |
| 13 | Kontrol Arus Kas | Manajemen Keuangan dan Aset | 1. | 3. Bagaimana kontrol arus kas dan likuiditas BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Setiap hari kami catat pemasukan dan pengeluaran. Ada batas minimal kas yang harus tersedia 5 juta untuk operasional. Jika ada pengeluaran besar harus ada persetujuan dari direktur dan dilaporkan dalam rapat bulanan." | Reduksi: Pencatatan harian dengan batas minimal kas 5 juta dan persetujuan direktur untuk pengeluaran besar. Display: Catat harian; Minimal kas: 5 juta; Persetujuan direktur untuk pengeluaran besar. Kesimpulan: Kontrol kas cukup ketat dengan sistem persetujuan bertingkat. |
| 14 | Pengelolaan | Manajemen | 1. | 4. | Tokoh | "BUMDes | Reduksi: |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------|----|---|----------------------------------|--|--|
| | Aset Desa | Keuangan dan Aset | | Bagaimana pengelolaan aset desa yang digunakan BUMDes? | Masyarakat (Bapak Firmanudin) | menggunakan tanah kas desa untuk pengembangan pertanian dan bangunan pasar desa untuk toko sembako. Aset ini dikelola dengan sistem sewa yang adil, hasilnya masuk ke kas desa dan sebagian untuk BUMDes." | Pemanfaatan tanah kas desa dan bangunan pasar dengan sistem sewa yang menguntungkan desa dan BUMDes. Display: Aset: tanah kas desa + bangunan pasar; Sistem sewa menguntungkan kedua pihak. Kesimpulan: Pengelolaan aset sinergi antara desa dan BUMDes. |
| 15 | Audit dan Pengawasan Keuangan | Manajemen Keuangan dan Aset | 1. | 5. Bagaimana proses audit dan pengawasan keuangan BUMDes? | Tokoh Agama (Bapak Burhan, S.Pd) | "Setiap tahun ada audit internal oleh tim dari BPD dan kadang ada pendampingan dari dinas terkait. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan tentang keuangan dalam rapat desa. Secara umum pengelolaan keuangan cukup baik dan transparan." | Reduksi: Audit internal tahunan oleh BPD dengan pendampingan dinas, masyarakat bisa bertanya di rapat desa. Display: Audit: tahunan oleh BPD; Pendampingan dinas; Tanya jawab di rapat desa. |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | Kesimpulan: Pengawasan keuangan cukup komprehensif dan transparan. |
| 16 | Potensi Pertanian Lokal | Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian | 2. Bagaimana potensi ekonomi di Desa Pendung Hiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat? | 1. Apa saja potensi sumber daya alam dan pertanian yang dimiliki desa? | Masyarakat Pengguna BUMDes (Bapak Hantes) | "Desa kami memiliki sawah seluas 200 hektar yang menghasilkan padi 2 kali setahun. Ada perkebunan kopi rakyat sekitar 50 hektar. Kami juga punya potensi budidaya ikan di kolam dan sungai. Hasil pertanian sebagian besar dijual ke luar desa." | Reduksi: Sawah 200 ha (padi 2x/tahun), kopi 50 ha, budidaya ikan, sebagian besar ekspor keluar desa. Display: Sawah: 200 ha; Kopi: 50 ha; Budidaya ikan; Ekspor hasil. Kesimpulan: Potensi pertanian sangat baik dan beragam. |
| 17 | Pemanfaatan Lahan dan Teknologi | Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian | 2. Bagaimana pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian saat ini? | 2. Bagaimana pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian saat ini? | Pengelola BUMDes (Budi) | "Masih banyak lahan yang belum optimal pemanfaatannya, terutama lahan pinggir. Teknologi pertanian masih tradisional, baru ada traktor untuk mengolah sawah. BUMDes berencana membuat unit usaha alat pertanian untuk disewakan." | Reduksi: Lahan pinggir belum optimal, teknologi masih tradisional kecuali traktor, BUMDes akan buat unit sewa alat. Display: Lahan pinggir: |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|----|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | belum optimal; Teknologi: tradisional+ traktor; Rencana: unit sewa alat. Kesimpulan: Masih ada ruang besar untuk optimasi pertanian dengan teknologi. |
| 18 | Diversifikasi Usaha Tani | Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian | 2. | 3. Bagaimana diversifikasi usaha tani yang telah dilakukan masyarakat? | Tokoh Masyarakat (Bapak Firmanudin) | "Beberapa petani mulai mengembangkan usaha ternak kambing dan ayam kampung. Ada juga yang mencoba budidaya jamur. Namun masih perlu pendampingan teknis dan permodalan untuk mengembangkan usaha ini lebih besar." | Reduksi: Diversifikasi ke ternak kambing, ayam kampung, jamur namun perlu pendampingan dan modal. Display: Diversifikasi: kambing, ayam, jamur; Perlu: pendampingan + modal. Kesimpulan: Diversifikasi mulai berkembang namun perlu dukungan. |
| 19 | Rantai Nilai Produk Pertanian | Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian | 2. | 4. Bagaimana rantai nilai produk pertanian dari hulu ke | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Padi dijual dalam bentuk gabah kering ke pengepul dengan harga kurang menguntungkan. | Reduksi: Jual gabah kering dan kopi mentah ke pengepul, |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|----|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | hilir? | | Kopi dijual dalam bentuk biji mentah. Kami belum memiliki fasilitas pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. BUMDes berencana membuat unit pengolahan hasil pertanian." | belum ada pengolahan, BUMDes berencana unit pengolahan. Display: Jual mentah: gabah kering, kopi; Belum pengolahan; Rencana: unit pengolahan BUMDes. Kesimpulan: Nilai tambah produk masih rendah, perlu pengembangan pengolahan. |
| 20 | Akses Pasar Produk Pertanian | Potensi Sumber Daya Alam dan Pertanian | 2. | 5. Bagaimana akses pasar untuk produk-produk pertanian desa? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Akses pasar masih terbatas pada pengepul lokal. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, kami menghadapi kendala transportasi dan kemasan. BUMDes sedang menjajaki kerjasama dengan supermarket di Sungai Penuh untuk memasarkan produk lokal." | Reduksi: Pasar terbatas pengepul lokal, kendala transportasi dan kemasan, BUMDes jajaki supermarket . Display: Pasar: pengepul lokal; Kendala: transportasi +kemasan; Peluang: supermarket Sungai |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---|---|--|--|
| | | | | | | | Penuh. Kesimpulan: Akses pasar masih terbatas, perlu perluasan melalui BUMDes. |
| 21 | UMKM yang Berkembang | Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 2. | 1. Apa saja jenis UMKM yang berkembang di desa? | Masyarakat Pengguna BUMDes (Bapak Hantes) | "UMKM yang berkembang antara lain warung makan, konter pulsa, bengkel motor, dan pengrajin anyaman bambu. Ada sekitar 25 UMKM aktif di desa. Sebagian besar masih skala rumah tangga dengan modal terbatas." | Reduksi: 25 UMKM aktif: warung, konter, bengkel, anyaman bambu, skala rumah tangga dengan modal terbatas. Display: Jumlah: 25 UMKM; Jenis: warung, konter, bengkel, anyaman; Skala: rumah tangga. Kesimpulan: UMKM cukup beragam namun masih skala kecil. |
| 22 | Dukungan BUMDes terhadap UMKM | Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 2. | 2. Bagaimana dukungan BUMDes terhadap perkembangan UMKM desa? | Pengelola BUMDes (Budi) | "BUMDes memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah 1% per bulan. Kami juga membantu pemasaran produk UMKM | Reduksi: Pinjaman modal bunga 1%/bulan, bantuan pemasaran melalui toko BUMDes, |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|----|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | melalui toko BUMDes. Ada program pelatihan manajemen usaha sederhana untuk pelaku UMKM." | pelatihan manajemen. Display: Bunga: 1%/bulan; Bantuan: pemasaran toko; Program: pelatihan manajemen. Kesimpulan: BUMDes aktif mendukung UMKM melalui berbagai program. |
| 23 | Inovasi Produk UMKM | Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 2. | 3. Apa saja inovasi produk yang telah dikembangkan UMKM? | Tokoh Agama (Bapak Burhan, S.Pd) | "Beberapa UMKM mulai mengembangkan produk olahan makanan seperti keripik singkong, dodol nangka, dan kue tradisional. Ada yang coba buat souvenir dari anyaman bambu dengan desain modern. Namun perlu pendampingan untuk aspek branding dan kemasan." | Reduksi: Inovasi: keripik singkong, dodol nangka, kue tradisional, souvenir anyaman modern, perlu pendampingan branding/kemasan. Display: Produk: keripik, dodol, kue, souvenir; Perlu: branding+kemasan. Kesimpulan: Mulai ada inovasi produk namun perlu peningkatan branding. |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|---|---------------------------------|--|---|
| 24 | Jaringan Distribusi UMKM | Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 2. | 4. Bagaimana jaringan distribusi produk UMKM desa? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Distribusi masih terbatas di sekitar desa dan Sungai Penuh. Beberapa produk mulai dijual online melalui media sosial. BUMDes berencana membuat marketplace online khusus untuk produk UMKM desa." | <p>Reduksi: Distribusi terbatas desa dan Sungai Penuh, mulai online media sosial, BUMDes rencana marketplace . Display: Area: desa+Sungai Penuh; Online: media sosial; Rencana: marketplace BUMDes. Kesimpulan: Distribusi terbatas namun mulai ekspansi online.</p> |
| 25 | Potensi Kemitraan UMKM | Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 2. | 5. Apa potensi kemitraan yang dapat dikembangkan dengan UMKM? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Kami sedang menjajaki kemitraan dengan hotel dan restoran di Sungai Penuh untuk supply produk lokal. Ada potensi kerjasama dengan sekolah untuk katering makanan. Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk UMKM mensupply | <p>Reduksi: Kemitraan: hotel/restoran supply produk, sekolah katering, pemda supply kantor. Display: Partner: hotel/restoran, sekolah, pemda; Produk: supply lokal, katering.</p> |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|----|---|---|---|--|
| | | | | | | kebutuhan kantor." | Kesimpulan: Potensi kemitraan cukup besar dengan berbagai sektor. |
| 26 | Kondisi Infrastruktur Desa | Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi | 2. | 1. Bagaimana kondisi infrastruktur ekonomi di desa saat ini? | Tokoh Masyarakat (Bapak Firmanudin) | "Jalan utama desa sudah diaspal dan cukup baik. Listrik sudah 24 jam, namun sering padam. Internet masih lemot, hanya ada satu provider yang kuat. Pasar desa perlu renovasi dan perluasan." | Reduksi: Jalan utama baik, listrik 24 jam tapi sering padam, internet lemot satu provider, pasar perlu renovasi. Display: Jalan: baik; Listrik: 24 jam+padam; Internet: lemot; Pasar: perlu renovasi. Kesimpulan: Infrastruktur dasar ada namun kualitas perlu peningkatan. |
| 27 | Aksesibilitas ke Pusat Ekonomi | Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi | 2. | 2. Bagaimana aksesibilitas dari desa ke pusat-pusat ekonomi terdekat? | Masyarakat Pengguna BUMDes (Bapak Hantes) | "Jarak ke Sungai Penuh sekitar 15 km dengan angkutan umum yang cukup lancar. Ke pasar tradisional terdekat sekitar 5 km. Masalah utama adalah biaya transportasi yang naik-turun karena harga BBM." | Reduksi: Sungai Penuh 15 km angkutan lancar, pasar 5 km, masalah biaya transportasi fluktuatif BBM. Display: Jarak: 15 km+5 km; |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|----|---|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | <p>Angkutan: lancar; Masalah: biaya BBM. Kesimpulan: Aksesibilitas cukup baik namun biaya transportasi menjadi kendala.</p> |
| 28 | Fasilitas Pendukung Ekonomi | Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi | 2. | 3. Apa saja fasilitas pendukung kegiatan ekonomi yang tersedia? | Pengelola BUMDes (Budi) | "Ada balai desa yang bisa untuk rapat dan pelatihan. Penggilingan padi sudah ada 2 unit. Klinik desa melayani kesehatan dasar. Belum ada bank, tapi ada ATM BRI. BUMDes berencana bikin unit layanan keuangan." | <p>Reduksi: Fasilitas: balai desa, 2 penggilingan padi, klinik, ATM BRI, rencana unit keuangan BUMDes. Display: Ada: balai, penggilingan, klinik, ATM; Belum: bank; Rencana: unit keuangan. Kesimpulan: Fasilitas dasar tersedia, BUMDes akan melengkapi layanan keuangan.</p> |
| 29 | Sistem Transportasi dan Logistik | Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi | 2. | 4. Bagaimana sistem transportasi dan logistik untuk perdagangan | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Transportasi mengandalkan truk kecil dan pick up. Belum ada ekspedisi resmi yang masuk desa. | <p>Reduksi: Transportasi truk kecil/pick up, belum ada ekspedisi</p> |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|----|---|----------------------------|--|--|
| | | | | ? | | Untuk pengiriman barang keluar desa harus ke Sungai Penuh dulu. BUMDes sedang diskusi untuk kerja sama dengan ekspedisi." | masuk desa, kirim barang via Sungai Penuh, diskusi kerjasama ekspedisi. Display: Kendaraan: truk kecil+pick up; Belum: ekspedisi masuk; Akses: via Sungai Penuh. Kesimpulan: Sistem logistik masih sederhana, perlu kerjasama ekspedisi. |
| 30 | Rencana Pengembangan Infrastruktur | Infrastruktur dan Aksesibilitas Ekonomi | 2. | 5. Apa rencana pengembangan infrastruktur untuk mendukung ekonomi desa? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Dalam APBDes tahun depan dialokasikan untuk memperbaiki pasar desa dan membuat tempat parkir yang luas. Ada rencana membangun gudang bersama untuk penyimpanan hasil pertanian. Juga sedang mengusulkan peningkatan jaringan internet ke pemkab." | Reduksi: APBDes: perbaikan pasar+parkir luas, rencana gudang bersama, usulan peningkatan internet ke pemkab. Display: APBDes: pasar+parkir; Rencana: gudang; Usulan: internet. Kesimpulan: Ada rencana konkret pengemb |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | gan infrastruktur pendukung ekonomi. |
| 31 | Lapangan Kerja yang Tercipta | Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan | 3. Bagaimana peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang? | 1. Berapa lapangan kerja yang tercipta dari kegiatan BUMDes? | Pengelola BUMDes (Budi) | "BUMDes telah membuka 15 lapangan kerja langsung, 8 tetap dan 7 paruh waktu. Dari unit usaha simpan pinjam, toko sembako, dan penggilingan padi. Secara tidak langsung, sekitar 40 petani mendapat manfaat dari fasilitas BUMDes." | Reduksi: 15 pekerjaan langsung (8 tetap, 7 paruh waktu) dari 3 unit usaha, 40 petani terbantu tidak langsung. Display: Langsung: 15 (8 tetap+7 paruh waktu); Tidak langsung: 40 petani; Unit: simpan pinjam, toko, penggilingan. Kesimpulan: BUMDes berhasil menciptakan lapangan kerja signifikan bagi warga. |
| 32 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan | 3. | 2. Bagaimana dampak BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat? | Masyarakat Pengguna BUMDes (Bapak Hantes) | "Sejak ada BUMDes, pendapatan saya dari jualan hasil pertanian meningkat sekitar 20%. Harga jual lebih stabil karena ada | Reduksi: Pendapatan petani naik 20%, harga jual stabil ada alternatif pembeli, pinjaman |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|----|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | alternatif pembeli. Pinjaman modal dari BUMDes membantu mengembangkan usaha kecil." | modal membantu usaha kecil. Display: Kenaikan: 20%; Harga: stabil; Modal: pinjaman BUMDes. Kesimpulan: BUMDes memberikan dampak positif signifikan pada pendapatan. |
| 33 | Program Pemberdayaan Ekonomi | Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan | 3. | 3. Apa saja program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "BUMDes menjalankan program pinjaman mikro untuk ibu-ibu PKK, pelatihan keterampilan jahit dan masak, dan program tabungan harian. Ada juga bantuan modal untuk usaha rumahan seperti jual gorengan dan kue." | Reduksi: Program: pinjaman mikro PKK, pelatihan jahit/masak, tabungan harian, bantuan modal usaha rumahan. Display: Target: ibu-ibu PKK; Program: mikro kredit, pelatihan, tabungan; Usaha: rumahan. Kesimpulan: BUMDes fokus pemberdayaan ekonomi perempuan dan usaha rumahan. |
| 34 | Sistem Bagi | Penciptaan | 3. | 4. | Kepala | "BUMDes | Reduksi: |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|----------------------------------|--|---|
| | Hasil dan Insentif | Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan | | Bagaimana sistem bagi hasil dan insentif dari BUMDes? | Desa (Bapak Mahmud) | memberikan bonus tahunan kepada masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan. Ada sistem bagi hasil 40% untuk BUMDes, 30% untuk kas desa, 30% untuk pembangunan. Anggota BUMDes mendapat insentif sesuai kinerja." | Bonus tahunan untuk pengguna aktif, bagi hasil 40:30:30 (BUMDes desa), insentif berdasarkan kinerja. Display: Bonus: pengguna aktif; Bagi hasil: 40:30:30; Insentif: sesuai kinerja. Kesimpulan: Sistem bagi hasil dan insentif sudah terstruktur adil. |
| 35 | Dampak jangka Panjang terhadap Kesejahteraan | Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan | 3. | 5. Bagaimana dampak jangka panjang BUMDes terhadap kesejahteraan desa? | Tokoh Agama (Bapak Burhan, S.Pd) | "Dalam 3 tahun terakhir, tingkat migrasi pemuda ke kota menurun karena ada peluang kerja di desa. Tingkat pendidikan anak-anak meningkat karena orang tua punya penghasilan lebih baik. Program sosial desa juga lebih aktif karena kas desa bertambah." | Reduksi: Migrasi pemuda menurun, pendidikan anak meningkat, program sosial lebih aktif karena kas desa bertambah. Display: Efek: ↓migrasi, ↑pendidikan, ↑program sosial; Penyebab: peluang kerja+pendapatan+kas |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---|---------------------------------|--|---|
| | | | | | | | desa. Kesimpulan: BUMDes berdampak positif jangka panjang pada kesejahteraan komprehensif. |
| 36 | Usaha Berbasis Padi dan Kopi | Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal | 3. | 1. Bagaimana pengembangan usaha berbasis komoditas lokal utama? | Pengelola BUMDes (Budi) | "BUMDes mengembangkan penggilingan padi dan berencana bikin unit pengolahan beras premium. Untuk kopi, kami mulai eksplorasi kopi specialty dengan pendampingan dari dinas pertanian. Targetnya bisa produksi kopi roastbean sendiri." | Reduksi: Penggilingan padi ada, rencana beras premium, eksplorasi kopi specialty, target produksi roastbean. Display: Padi: ada penggilingan → beras premium; Kopi: specialty → roastbean. Kesimpulan: BUMDes mengoptimalkan komoditas utama dengan value added. |
| 37 | Produk Olahan Hasil Pertanian | Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal | 3. | 2. Apa saja produk olahan yang dikembangkan dari hasil pertanian? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Kami sudah mengembangkan keripik singkong, sale pisang, dan dodol nangka. Sedang uji coba produk tepung singkong | Reduksi: Produk jadi: keripik singkong, sale pisang, dodol nangka; Uji coba: tepung |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|----|--|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | organik. Rencananya akan bikin pusat pengolahan makanan tradisional skala desa." | singkong organik; Rencana: pusat pengolahan makanan tradisional. Display: Jadi: 3 produk olahan; Uji coba: tepung organik; Rencana: pusat pengolahan. Kesimpulan: Diversifikasi produk olahan sudah dimulai dengan rencana pengembangan lebih besar. |
| 38 | Pengembangan Wisata Lokal | Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal | 3. | 3. Bagaimana pengembangan sektor wisata sebagai potensi lokal? | Tokoh Masyarakat (Bapak Firmanudin) | "Desa punya potensi wisata sawah terasering dan air terjun kecil. BUMDes berencana bikin paket wisata edukasi pertanian dan home stay sederhana. Sudah mulai bikin jalur trekking dan spot foto." | Reduksi: Potensi: sawah terasering, air terjun; Rencana: wisata edukasi+homestay; Progress: jalur trekking+spot foto. Display: Potensi: alam; Konsep: edukasi pertanian; Fasilitas: jalur+spot |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|---|---|--|--|
| | | | | | | | foto. Kesimpulan: Pengembangan wisata lokal mulai disiapkan dengan konsep yang tepat. |
| 39 | Kerjasama Pengembangan Produk | Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal | 3. | 4. Bagaimana kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan produk lokal? | Masyarakat Pengguna BUMDes (Bapak Hantes) | "Ada kerjasama dengan universitas untuk penelitian kopi specialty. Dinas perindustrian memberikan pelatihan kemasan dan branding. Sedang diskusi dengan investor swasta untuk upgrading teknologi pengolahan." | Reduksi: Kerjasama: universitas (riset kopi), dinas (kemasan/branding), diskusi investor swasta (teknologi). Display: Partner: universitas, dinas, swasta; Bidang: riset, kemasan, teknologi. Kesimpulan: BUMDes aktif menjalin kerjasama strategis untuk pengembangan produk. |
| 40 | Inovasi dan Modernisasi | Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal | 3. | 5. Apa saja inovasi dan modernisasi yang dilakukan BUMDes? | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "BUMDes mulai gunakan teknologi sortir beras otomatis. Ada rencana aplikasi mobile untuk layanan simpan pinjam. Sistem pembayaran mulai pakai QR | Reduksi: Inovasi: sortir beras otomatis, rencana aplikasi mobile, pembayaran QR code. Display: Teknologi: |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|----|---|----------------------------|---|---|
| | | | | | | code untuk kemudahan transaksi." | sortir otomatis; Rencana: app mobile; Sistem: QR payment. Kesimpulan: BUMDes mulai adopsi teknologi modern untuk efisiensi layanan. |
| 41 | Kontribusi ke Pendapatan Asli Desa | Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan | 3. | 1. Berapa kontribusi BUMDes terhadap PADes? | Pengelola BUMDes (Budi) | "Tahun 2023, BUMDes menyumbang 180 juta ke PADes dari total 600 juta, atau sekitar 30%. Target 2024 menaikkan kontribusi jadi 35% dengan ekspansi unit usaha baru." | Reduksi: Kontribusi 2023: 180 juta dari 600 juta PADes (30%), target 2024: 35% dengan unit usaha baru. Display: 2023: 30% (180/600 juta); Target 2024: 35%; Strategi: ekspansi unit. Kesimpulan: Kontribusi BUMDes terhadap PADes cukup signifikan dan terus ditingkatkan. |
| 42 | Penggunaan Dana untuk Pembangunan | Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa | 3. | 2. Bagaimana pemanfaatan dana | Kepala Desa (Bapak Mahmud) | "Dana dari BUMDes digunakan untuk renovasi | Reduksi: Penggunaan : renovasi posyandu, |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|----|---|---------------------------------|---|---|
| | | dan Pembangunan | | BUMDes untuk pembangunan desa? | | posyandu, perbaikan jalan kampung, dan bantuan pendidikan anak kurang mampu. 30% alokasi khusus untuk infrastruktur ekonomi seperti perbaikan pasar dan pembuatan gudang bersama." | jalan kampung, bantuan pendidikan; 30% khusus infrastruktur ekonomi (pasar, gudang). Display: Sosial: posyandu, jalan, pendidikan; Ekonomi: 30% untuk pasar+gudang. Kesimpulan: Dana BUMDes dialokasikan seimbang untuk pembangunan sosial dan ekonomi. |
| 43 | Program Sosial yang Didanai | Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan | 3. | 3. Apa saja program sosial yang didanai dari keuntungan BUMDes? | Anggota BUMDes (Ibu Siti Hajar) | "Ada program bantuan biaya berobat untuk lansia, bantuan sekolah untuk anak yatim, dan program pelatihan gratis untuk pemuda. Juga ada dana cadangan untuk situasi darurat bencana alam." | Reduksi: Program: bantuan berobat lansia, sekolah anak yatim, pelatihan pemuda, dana darurat bencana. Display: Target: lansia, yatim, pemuda; Jenis: kesehatan, pendidikan, pelatihan; Plus: dana |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|----|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | darurat. Kesimpulan: Program sosial komprehensif menjangkau berbagai kelompok masyarakat. |
| 44 | Dampak Pembangunan Infrastruktur | Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan | 3. | 4. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur dengan dana BUMDes? | Tokoh Agama (Bapak Burhan, S.Pd) | "Pembangunan pasar baru meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Perbaikan jalan memudahkan akses transportasi hasil pertanian. Gudang bersama membantu petani menyimpan hasil panen lebih lama untuk harga yang lebih baik." | Reduksi: Pasar baru: ↑aktivitas ekonomi; Perbaikan jalan: ↑akses transportasi; Gudang bersama: ↑harga jual petani. Display: Infrastruktur → Dampak: pasar→ekonomi, jalan→transport, gudang→harga. Kesimpulan: Infrastruktur yang dibangun BUMDes memberikan dampak ekonomi langsung. |
| 45 | Keberlanjutan Pendanaan Pembangunan | Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan | 3. | 5. Bagaimana keberlanjutan pendanaan pembangunan dari BUMDes? | Tokoh Masyarakat (Bapak Firmanudin) | "BUMDes punya rencana investasi jangka panjang untuk memastikan keuntungan stabil. Ada komitmen 25% | Reduksi: Rencana investasi jangka panjang, komitmen 25% keuntungan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>keuntungan selalu dialokasikan untuk pembangunan. Rencana ekspansi usaha untuk meningkatkan kontribusi di masa depan."</p> | <p>untuk pembangunan, ekspansi usaha untuk kontribusi masa depan. Display: Strategi: investasi jangka panjang; Komitmen: 25% keuntungan; Rencana: ekspansi usaha. Kesimpulan: Keberlanjutan pendanaan terjamin dengan strategi yang terukur.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

Lampiran 2





PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 94 /III/2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor In.31/D.4/PP.00.9/048.13/2025 Tanggal 26 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **RONI PUTRA**
b. Jabatan : Mahasiswa
- Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 19 Maret 2025



a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris,

ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP. 197212121996031006

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci
5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jalan Pelita IV Sungai Penuh Telp: 0748 – 21065 Faks: 0748 – 22114
Kode Pos: 37112 Website: www.iainkerinci.ac.id e-mail : info@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/D.4/PP.00.9/048.13/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu rangkap proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Sungai Penuh, 26 Februari 2025

Kepada,
Yth. **Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh**
Di -
Sungai Penuh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

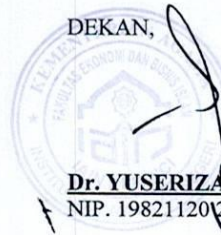
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Kerinci:

Nama : **RONI PUTRA**
NIM : 2110402055
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Proposal : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh
Skripsi :
Lokasi dan lama : Desa Pendung Hiang, dengan lama penelitian 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat izin.
Penelitian :

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dr. YUSERIZAL BUSTAMI, M.A
NIP. 19821120201101 1 010

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pelita IV Kota Sungai Penuh Fax. (0748) – 22114 Telp. 0748 – 21065
Kode Pos 37112 Website: www.iainkerinci.ac.id e-mail : info@iainkerinci.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
Nomor : In.31/D.4/PP.00.9/013.13/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan dosen-dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kerinci;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kerinci;
3. Surat Rektor IAIN Kerinci Nomor B-732/In.31/R.1/KP/00.1/07/2024, tanggal 01 Juli 2024, Perihal : Penyesuaian SK Pembimbing Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : **H. Samsul Bahry Harahap, Lc,MA**
NIP : 19691222 200112 1 002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I/ IV b
Jabatan : Lektor

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir:

Nama : **RONI PUTRA**
NIM : 2110402055
Jurusan : Ekonomi Syariah
Topik/Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 26 Februari 2025

DEKAN,

Dr. YUSERIZAL BUSTAMI, M.A
NIP.19821120201101 1 010

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
3. Dosen Pembimbing;
4. Mahasiswa Bimbingan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN TANAH KAMPUNG
DESA PENDUNG HIANG

Jalan Raya Desa Pendung Hang

Pos. 37121

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/ 4/ /IV/2025/Kds-PH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MATTAKIN**
NIK : 1572045601970001
Jabatan : Kepala Desa Pendung Hiang
Alamat : RT 004 Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah
Kampung Kota Sungai Penuh

Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa/mahasiswi Yang beridentitas :

Nama : **RONI PUTRA**
NIM : 2110402055
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian Draf Artikel di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Terhitung mulai dari Tanggal, 19 Maret – 19 april 2025 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh**

Demikian surat keterangan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Pendung Hiang
Pada Tanggal : 19 April 2025
Kepala Desa Pendung Hiang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP : RONI PUTRA
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PENDUNG HIANG, 16 JANUARI 2003
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PEKERJAAN : MAHASISWA IAIN KERINCI
ALAMAT : PENDUNG HIANG
NAMA ORANG TUA :

AYAH : DESI RIDUWAN

IBU : SUARNI

PENDIDIKAN

| No Pendidikan | Tempat | Tahun |
|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | SDN 060/III Pendung Hiang | Pendung Hiang 2009–2015 |
| 2 | SMP 4 Kerinci | Hiang 2015–2018 |
| 3 | SMAN 1 Kerinci | Hiang 2018–2021 |
| 4 | IAIN Kerinci | Sungai Penuh 2021–2025 |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI